



LAPORAN KINERJA

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA



TAHUN 2024

DIBUAT OLEH :

BAGIAN ORGANISASI

 [www.https://palangkaraya.go.id/.com](https://palangkaraya.go.id/.com)

 + (0536) 3231496-3231478

 setda.skotapalangkaraya.go.id

 JL Ijilik Riwut Km 5,5 Nomor 98
Palangka Raya



Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2024 ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu telah ditentukan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Kota Palangka Raya ini merupakan media pertanggung jawaban yang berisikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja yang disampaikan secara periodik untuk mengetahui dan menilai kinerja Kota Palangka Raya dalam melaksanakan kegiatan.

Laporan Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. AKIP ini menyajikan informasi tentang ukuran sejauh mana keberhasilan ataupun kekurangan dalam pencapaian target kinerja pemerintah yang telah dilaksanakan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah.

Akhirnya kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat digunakan sebagai Media pertanggungjawaban kinerja serta bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Pemerintah Kota Palangka Raya.

Palangka Raya, 27 Maret 2025

WALI KOTA PALANGKA RAYA



FAIRID NAPARIN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Telah Direviu	iii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Bab I Pendahuluan		
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	4
C. Gambaran Umum	5
D. Dasar Hukum	13
E. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Dearah	15
F. Isu Strategis Kota Palangka Raya	16
G. Sistematika Penyajian	20
Bab II Perencanaan Kinerja		
A. Rencana Strategis	22
B. Perjanjian Kinerja	27
Bab III Akuntabilitas Kinerja		
A. Pengukuran Kinerja	35
B. Akuntabilitas Keuangan	162
Bab IV Penutup		
	173
Lampiran		



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA INSPEKTORAT

Jalan G. Obos XIV, Gang Teratai, Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya
Kalimantan Tengah 73112

Laman: <https://inspektorat.palangkaraya.go.id/>, Pos-el: inspektorat@palangkaraya.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palangka Raya untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kota Palangka Raya.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Palangka Raya, 27 Maret 2025

INSPEKTUR KOTA PALANGKA RAYA,



IF. HAMBALI, CGCAE
Pemertua Utama Muda
NIP. 196706021993031017



Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan refleksi dari usaha Reformasi Birokrasi yang dikelola dengan baik. Begitu halnya dengan Pemerintah Kota Palangka Raya selaku penyelenggara negara dan pemerintahan yang bercita – cita mensejahterakan masyarakat serta berupaya dengan berbagai kebijakan dan program yang secara operasional bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat dalam bentuk kinerja yang prima.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2024 dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026. Telah ditetapkan sasaran dan indikator kinerja utama yang harus di capai Pemerintah Kota Palangka Raya dalam kurun waktu tiga tahun mulai tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

Adapun anggaran yang digunakan dalam mencapai keberhasilan tersebut sebesar Rp. 1.549.940.752.475,00 dan realisasi anggaran sebesar 1.456.074.109.672,67. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun anggaran 2024 ini, diharapkan dapat lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih baik.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah

yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa setiap daerah berkewajiban untuk menyusun rencana pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Untuk mencapai suatu kondisi yang diinginkan dan sasaran yang hendak dituju maka Pemerintah Kota Palangka Raya telah menetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026.



Gambar 1.1 Kota Palangka Raya

Pemerintah mengharapkan dengan penetapan Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 yang disusun dengan maksud dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Palangka Raya secara berkesinambungan. Dan setiap akhir tahun anggaran dapat dilakukan penelusuran realisasi apakah capaian kinerja sudah sesuai dengan rencana

kinerja melalui mekanisme pelaporan, salah satunya berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

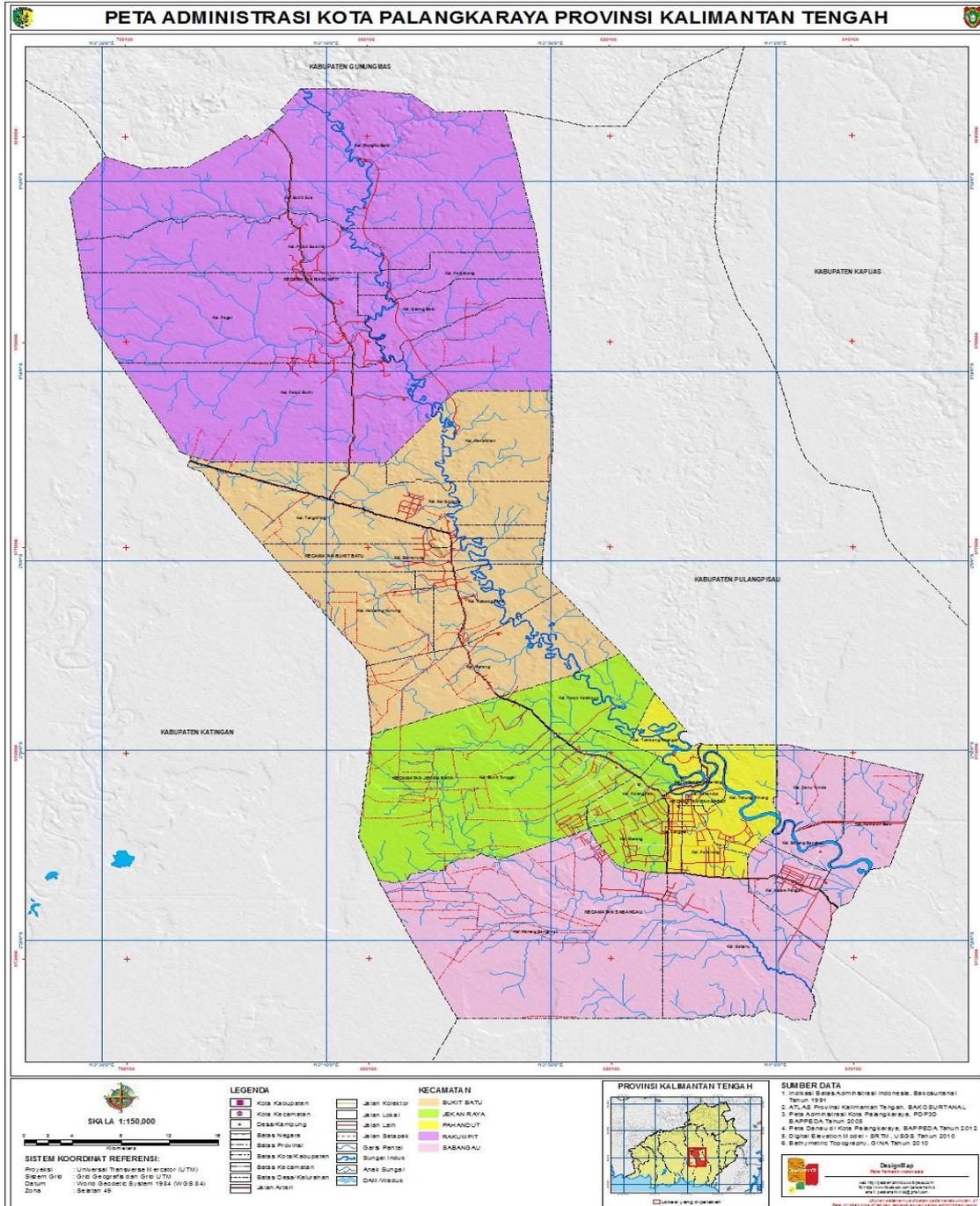
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2024 dimaksudkan sebagai wujud kewajiban penyelenggara pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran indikator pembangunan yang ditetapkan pemerintah dalam masa satu tahun anggaran dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai strategi, arah kebijakan dan program prioritas daerah.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Kota Palangka Raya adalah sebagai sarana bagi pemerintah dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah dalam satu tahun kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Kota Palangka Raya. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah (PD) Kota Palangka Raya, Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026.
2. Guna perbaikan Tata Kepemerintahan yang baik (*Good Government*) dan perbaikan kinerja, masih banyak kekurangan di dalam Pemerintahan dalam rangka mencapai keberhasilan pencapaian sasaran secara maksimal.
3. Alat kendali untuk mengukur dan mendorong peningkatan kinerja pemerintah selama kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Meningkatkan kredibilitas dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah.
5. Sebagai dasar penyempurnaan dokumen perencanaan tahun berikutnya.

C. GAMBARAN UMUM

Profil Kota Palangka Raya



Letak Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113°30`- 114°07` Bujur Timur dan 1°35`- 2°24` Lintang Selatan. Berdasarkan Permendagri Nomor 73,74,75 Tahun 2013 luas wilayah Kota Palangka Raya adalah 2.853,52 Km² (285.351,28 Ha) Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan: Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas Sebelah Timur : Kabupaten Pulang Pisau Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau Sebelah Barat : Kabupaten Katingan Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut dengan luas wilayah 119,41 Km², Kecamatan Sabangau dengan luas wilayah 641,47 Km², Kecamatan Jekan Raya dengan luas wilayah 387,53 Km², Kecamatan Bukit Batu dengan luas wilayah 603,16 Km² dan Kecamatan Rakumpit dengan dengan luas wilayah 1.101,95 Km².

Pengembangan wilayah di Kota Palangka Raya memperhatikan berbagai aspek yang dinilai memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk dan menciptakan struktur dan pola tata ruang. Pola pengembangan wilayah Kota Palangka Raya memperhatikan aspek kecenderungan pengembangan pembangunan, fungsi-fungsi kawasan, karakteristik alam, proyek pertumbuhan penduduk, kecenderungan investasi. Pola pemanfaatan ruang wilayah Kota Palangka Raya sampai dengan tahun 2029 terdiri dari kawasan Hutan Pendidikan dan Penelitian dengan luas kawasan 36.153 ha; Kawasan Lindung Sungai dan Danau dengan luas kawasan 11.808 ha; Taman Wisata terdiri dari Nyaru Menteng, Bukit Tangkiling, Marang dengan luas kawasan masing-masing 861 ha, 414 ha, 1873 ha, 3.648 ha; Hutan PLG dengan luas kawasan 3.648 ha; Kawasan Sosial Forestry dengan luas kawasan 3.590 ha; Kawasan Hutan Produksi dengan luas kawasan 7.064 ha; Kawasan Pengembangan Produksi dengan luas kawasan 84.353 ha; Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lain dengan luas kawasan 117.187 ha.



Gambar 1.2 Tugu Soekarno di Palangka Raya

Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota Palangka Raya dilakukan melalui proses delineasi (batas-batas) kawasan kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan kawasan-kawasan lainnya di dalam kawasan budidaya dan delineasi kawasan lindung. Selain itu dalam prosesnya juga memperhatikan berbagai aspek yang dinilai memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk dan menciptakan struktur dan pola tata ruang wilayah kota yang terpadu yaitu: mempertimbangkan kecenderungan perkembangan pembangunan dan pengembangan Kota Palangka Raya saat ini, memperhatikan wilayah administratif Kota Palangka Raya yang terdiri dari lima kecamatan dengan batas-batasnya serta cakupan luas wilayah dari masing-masing kecamatan tersebut, memperhitungkan keberadaan sistem-sistem pelayanan dan fungsi-fungsi kawasan yang ada di Kota Palangka Raya, mempertimbangkan kondisi karakteristik alam dan geografis yang dimiliki serta aspek kependudukan, memperhatikan proyeksi pertumbuhan penduduk sampai dengan tahun 2029, memperhatikan kecenderungan investasi di bidang pertambangan dan pertanian di Kota Palangka Raya, memperhatikan posisi dan peranan Kota Palangka Raya sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah.

Keberadaan kota Palangka Raya memiliki sejarah yang cukup panjang dari adanya wilayah dan Pemerintahan yang memiliki struktur dan sistem sesuai

perkembangan zaman. Berawal dari berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 3 Nomor Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9). Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang tersebut terbitlah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor DES.52/12/2-206 tanggal 22 Desember 1959 tentang Pemindahan Tempat dan Kedudukan Pemerintah Daerah di Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959.

Dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tersebut maka ditetapkan Pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dengan menjadikan Palangka Raya sebagai Ibukota Provinsi. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, peningkatan sektor ekonomi dan luasan wilayah, melalui Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan Kecamatan yang masing-masing membawahi beberapa daerah pinggiran, Maka terbentuklah 5 (lima) Kecamatan keseluruhannya terdiri atas Kecamatan Pahandut, Jekan Raya, Sabangau, bukit Batu dan Rakumpit.

Pj. Wali Kota Palangka Raya Periode 2023-2024

Hera Nugrahayu, lahir di Tanjungkarang pada tanggal 22 Agustus 1969. Beliau menyelesaikan pendidikan SD di Bandung pada 1981, pendidikan SMP di



Tanjungkarang pada tahun 1984 dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di Tanjungkarang pada tahun 1987. Setelah menamatkan pendidikan sekolah menengah atas, beliau menyelesaikan pendidikan Diploma III di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Tanjungkarang pada tahun 1990 dan melanjutkan Pendidikan Strata 1 di Institusi Ilmu Pemerintahan (IIP) Depdagri-Jakarta pada tahun 1996 serta melanjutkan Pendidikan Magister di Magister Ekonomika Pembangunan (MEP) Universitas Gadjah Mada-Yogyakarta pada tahun 1998.

Pada tanggal 25 September 2023, Hera Nugrahayu dilantik sebagai Pj.Wali Kota Palangka Raya di aula Jayang Tingan lantai III Kantor Gubernur oleh Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Sugianto Sabran.

Pj. Wali Kota Palangka Raya Periode 2024-2025



AKHMAD HUSAIN
Pj. Wali Kota Palangka Raya

Akhmad Husain, lahir di Banjarmasin pada tanggal 6 Agustus 1969. Beliau menyelesaikan pendidikan SDN Kamboja tahun 1981, Pendidikan SMPN 5 tahun 1984 dan menyelesaikan pendidikan SMAN 5 pada Tahun 1987. Setelah menamatkan pendidikan sekolah menengah atas, beliau menyelesaikan pendidikan D-III APDN Palangka Raya pada tahun 1991, S-1 Sosial Politik Ilmu Pemerintahan Institut Ilmu Pemerintahan di Jakarta tahun 1997 dan menyelesaikan S-2 Ilmu Sosial pada Tahun 2004.

Pada tanggal 11 Desember 2024, Akhmad Husain dilantik sebagai Pj. Wali Kota Palangka Raya oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Edy Pratowo mewakili Gubernur Kalimantan Tengah.

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Kota Palangka Raya membentuk lembaga-lembaga pemerintahan dalam bentuk Sekretariat, Badan, Dinas, Kecamatan, dan Daerah pinggiran serta unit kerja lainnya sesuai kebutuhan, tugas pokok dan fungsi. Adapun Organisasi yang Telah terbentuk adalah sebagai berikut :

A. Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

- a) Bagian Pemerintahan
- b) Bagian Hukum
- c) Bagian Kesejahteraan Rakyat

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

- a) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

- b) Bagian Administrasi Pembangunan
 - c) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)
3. Asisten Administrasi Umum
- a) Bagian Umum
 - b) Bagian Organisasi
 - c) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan



Gambar 1.3 Kantor Pemerintah Kota Palangka Raya

B. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

C. Lembaga Teknis Daerah

1. Inspektorat
2. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Badan Keuangan dan Aset Daerah
5. Badan Pendapatan Daerah
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

D. Dinas-Dinas

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan

3. Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang
 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
 5. Dinas Sosial
 6. Dinas Tenaga Kerja
 7. Dinas Perhubungan
 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 9. Dinas Lingkungan Hidup
 10. Dinas Komunikasi Informatika, Stastistik dan Persandian
 11. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 12. Dinas Perikanan
 13. Dinas Parawisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
 14. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
 15. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
 16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 17. Dinas Pengendalian Pendudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat.
 18. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 19. Satuan Polisi Pamong Praja
- E. Kecamatan
1. Pahandut
 2. Jekan Raya
 3. Sabangau
 4. Bukit Batu
 5. Rakumpit
- F. Kelurahan
1. Pahandut
 2. Langkai
 3. Pahandut Seberang
 4. Panarung
 5. Tumbang Rungan

6. Tanjung Pinang
7. Bukit Tunggai
8. Palangka
9. Menteng
10. Petuk Ketimpun
11. Kalampangan
12. Kameloh Baru
13. Kereng Bangkirai
14. Sabaru
15. Bereng Bengkel
16. Danau Tundai
17. Tangkiling
18. Marang
19. Tumbang Tahai
20. Sei Gohong
21. Kanarakan
22. Habaring Hurung
23. Banturung
24. Mungku Baru
25. Bukit Sua
26. Petuk Barunai
27. Panjehang
28. Gaung Baru
29. Pager
30. Petuk Bukit

D. DASAR HUKUM

Dasar Hukum Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 Kota Palangka Raya adalah:

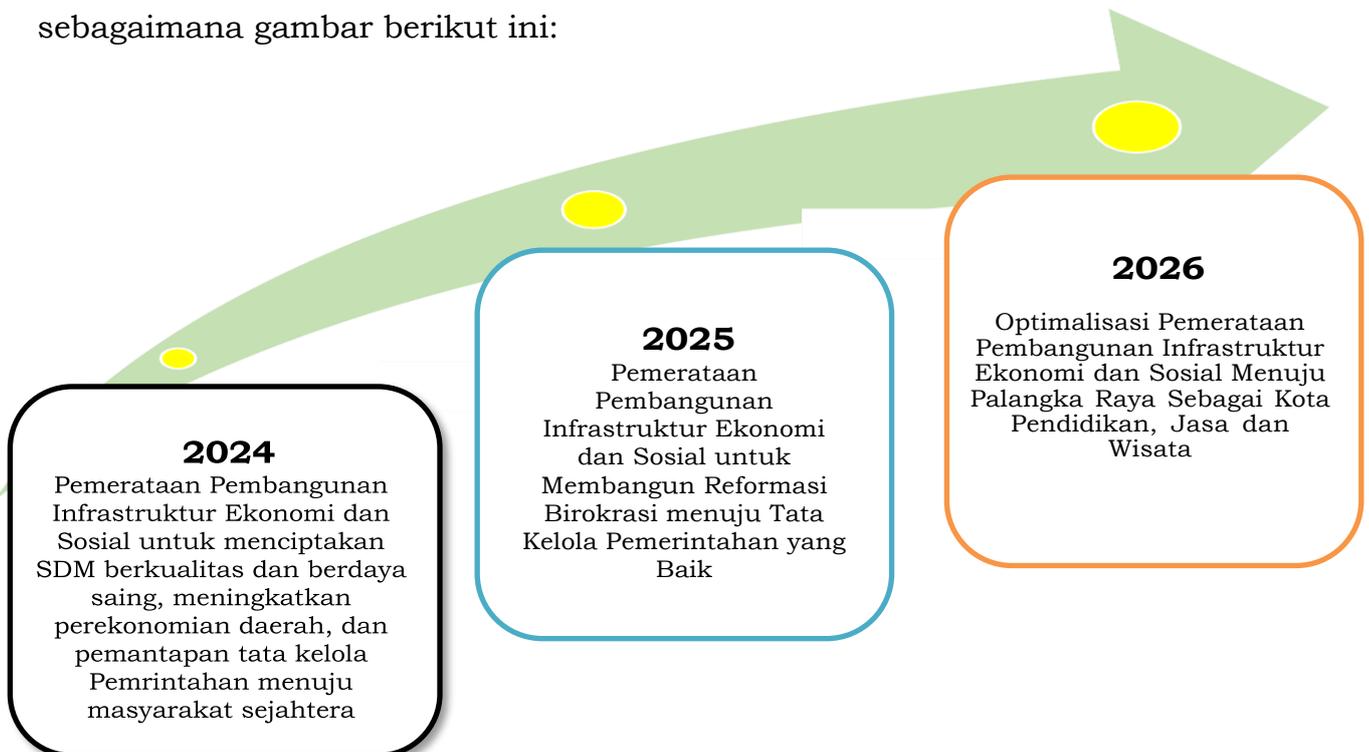
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
15. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instransi Pemerintah;
20. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026.

E. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAEARAH

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu RPD. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan arah kebijakan setiap tahun selama periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Arah kebijakan tahunan memandu sinkronisasi antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan, dan akan menjadi tema pembangunan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026.

Arah kebijakan tahunan dirumuskan berdasarkan hasil telaahan urgensi isu permasalahan pembangunan yang perlu direspons secara sistematis dan bertahap. Untuk memberi arah pembangunan tahunan pada RPD dibuat Arah Kebijakan Pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026, untuk masing-masing Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan sebagaimana gambar berikut ini:



F. ISU STRATEGIS KOTA PALANGKA RAYA

Perumusan isu strategis didapatkan berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang didapatkan berdasarkan telaah pada kondisi daerah, telaah aspek keuangan daerah, telaah isu internasional, isu nasional, dan telaah dokumen perencanaan terkait. Berikut merupakan isu strategis Kota Palangka Raya yang dirumuskan dari permasalahan pembangunan saat ini:

1. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia berimplikasi pada kualitas tata kelola pemerintahan.
2. Diketahui bersama bahwa Kota Palangka Raya memiliki tiga wajah yaitu Wajah Perkotaan, Wajah Hutan, dan Wajah Pedesaan. Dengan kekhasan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam mengembangkan potensi pariwisata yang belum tertata dengan baik sebagaimana cita-cita Kota Palangka Raya yang tertuang dalam visi RPJPD Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 yaitu mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Wisata Yang Berkualitas, Tertata dan Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat Sejahtera sesuai Falsafah Budaya Betang. Dengan terbenahnya potensi wisata di Kota Palangka Raya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya pemasaran produk-produk pelaku UMKM di Kota Palangka Raya.
3. Salah satu kebijakan yang diambil yaitu pengembangan infrastruktur melalui Peningkatan jaringan simpul transportasi. Sementara untuk lingkungan hidup adalah Peningkatan Ketangguhan Masyarakat dalam mitigasi bencana. Kebijakan ini tentu menjadi peluang bagi kota Palangkaraya untuk menjalin kerjasama dalam peningkatan konektivitas wilayah maupun penanggulangan bencana.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2024 berdasarkan evaluasi penilaian keselarasan Rencana Pembangunan Daerah telah dilakukan penajaman dan keselarasan agar output dan outcome dapat merealisasikan Rencana Pembangunan Daerah tersebut dan menjadi solusi dalam menghadapi isi-isu strategis yang sedang berkembang sehingga dilakukan penertapan perubahan penyelarasan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palangka Raya untuk tahun 2024-2026 seperti tertuang dalam table dibawah ini :

Tabel 1.2 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palangka Raya berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Periode Tahun 2024-2026

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas		Indesk Pembangunan Manusia
		1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Prestasi Pemuda	Angka Harapan Lama Sekolah
			Angka Rata-Rata Lama Sekolah
			Jumlah Prestasi Pemuda Kota Palangka Raya pada tingkat Kota, Provinsi, Nasional dan Internasional
		2. Meningkatnya Layanan dan Aksesibilitas Kesehatan	Angka Harapan Hidup
		3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
		4. Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka
2.	Meningkatkan Kualitas Pariwisata		Jumlah Kunjungan Wisatawan
		5. Meningkatnya Kualitas Sektor Pariwisata dan Kebudayaan	Jumlah Event Seni dan Budaya
3.	Menciptakan Pemerataan Pembangunan antara Wilayah Kecamatan yang berkelanjutan		Perbedaan (deviasi) Persentase Penduduk Miskin antar Kecamatan
		6. Terwujudnya Pemerataan Infrastruktur Ekonomi maupun Sosial antar Kecamatan	Indeks Aksesibilitas Wilayah
		7. Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
4.	Meningkatkan Perekonomian Daerah		Pertumbuhan Ekonomi
		8. Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategi	Skor Pola Pangan Harapan
		9. Meningkatnya Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Investasi PMDN
5.	Meningkatkan Kerukunan dan Ketertiban di Kalangan Masyarakat		Indeks Ketertiban dan Keamanan
		10. Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan di Kalangan Masyarakat	Persentase Penegakan Peraturan Daerah (PPPD) Indeks Toleransi
6.	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi
		11. Meningkatnya Pemerintahan yang	Opini BPK
			Nilai SAKIP

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
		Akuntabel dan Berintegritas	Indeks Profesionalisme ASN
			Indeks SPBE
		12. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah	Indeks Perencanaan Daerah
		13. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	IKM

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Bentuk laporan akuntabilitas kinerja ini selain berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan surat keputusan kepala LAN nomor 239 Tahun 2003 tentang pedoman pelaporan akuntabilitas kinerja instansi juga memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan kinerja ini ditekankan pada aspek capaian dari program, sasaran dan kegiatan.

Sistematika Penyusunan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang Pemerintah Kota Palangka Raya, dengan penekanan kepada aspek strategis Pemerintah Kota Palangka Raya serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi o Pemerintah Kota Palangka Raya.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Pemerintah Kota Palangka Raya sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran Pemerintah Kota Palangka Raya tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standard nasional;
5. Analisis penyebab dari keberhasilan atau kegagalan serta peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Pemerintah Kota Palangka Raya untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-lampiran



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) disusun untuk mengisi kekosongan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya yang berakhir pada tahun 2023 akibat adanya Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024. Tujuan dirumuskan untuk mencapai kondisi yang diharapkan secara terukur dalam periode masa dokumen Rencana Pembangunan Daerah ini.

Mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, Rencana Pembangunan Daerah tidak memuat Visi dan Misi, sehingga penentuan tujuan didasarkan pada visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028, analisa sasaran pokok dan/atau analisa arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahap keempat, dan isu strategis aktual.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka periode Tahun 2024-2026 ini adalah merupakan periode keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palangka Raya 2008-2028 dengan Visi “TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN, JASA DAN WISATA YANG BERKUALITAS, TERTATA DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA, SESUAI FALSAFAH BUDAYA BETANG”

Dalam visi tersebut terkandung peri kehidupan Kota (nilai-nilai) yang diidam-idamkan bersama, yaitu:

1) Tertata dan Berwawasan Lingkungan

Bahwa Palangka Raya sebagai Ibukota Provinsi dan sekaligus Wilayah Kota, secara langsung ataupun tidak langsung mencerminkan citra Kalimantan Tengah. karena itu pembangunan kota harus teratur, tertib, menampilkan Nilai-nilai budaya lokal yang relevan serta mempertimbangkan kelestarian lingkungan.

2) Sejahtera

Adalah kondisi, tingkat dan derajat perubahan kehidupan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya

3) Masyarakat Sejahtera

Adalah terciptanya kondisi kehidupan masyarakat dengan rasa aman dan damai sehingga mampu untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk membangun kesejahteraannya, bahwa Kondisi aman yang didambakan adalah semakin berkurangnya perasaan traumatis di kalangan penduduk Kota Palangka Raya pasca konflik etnik, terciptanya rasa tenteram dalam kehidupan masyarakat, tegaknya supremasi hukum karena didukung oleh aparat yang bersih dan berwibawa. Kondisi internal yang demikian akan membangun citra pihak luar, termasuk calon Investor bahwa Kota Palangka Raya sudah aman dan prospektif untuk dikunjungi dan berusaha. Kehidupan sejahtera ditandai dengan sedikitnya 3 hal, yaitu (1) Kecukupan (*sustenance*); (2) meningkatkan harga diri/martabat (*self esteem*); dan (3) kebebasan memilih dan berpartisipasi (*freedom*).

4) Falsafah Budaya Betang

Falsafah Budaya Betang perlu diangkat diperkenalkan serta dihayati oleh masyarakat Kota Palangka Raya. Budaya ini digali dan dibangun dari nilai-nilai, norma-norma dan adat istiadat suku Dayak yang berlaku dan masih relevan dengan kehidupan modern (setelah disaring

oleh nilai-nilai Pancasila). Budaya Betang mengandung nilai-nilai peradaban, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung (belum-bahadat), kerukunan, toleransi, demokrasi (penyang hinje simpei), kesatriaan (mahaga petak-danom), kepemimpinan dan kebersamaan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palangka Raya 2008-2028 mempunyai 6 misi, yaitu:

- A. Mewujudkan Kota Palangka Raya Sebagai Kota Pendidikan yang Berkualitas, Berorientasi Global dengan berkearifan lokal, menuju terwujudnya sumber daya manusia yang berilmu, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sehat dan terampil;
- B. Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai pusat pelayanan jasa dan wisata yang terencana, tertata dan berwawasan lingkungan;
- C. Mewujudkan prasarana dan sarana publik yang terencana, tertata dan berkualitas;
- D. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang lestari, dunia usaha dan investasi yang kondusif untuk mengembangkan perekonomian yang berkeadilan dan memberdayakan potensi masyarakat, menuju kehidupan sejahtera dan mandiri;
- E. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, harmonis, dinamis, rukun dan damai dengan menjunjung tinggi falsafah budaya betang;
- F. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) aparatur pemerintah yang berdisiplin tinggi, profesional, bersih dan berwibawa serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Tahapan dan skala prioritas yang menjadi agenda dalam periode keempat RPJPD Kota Palangka Raya adalah mewujudkan Kota Palangka Raya yang maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif

diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Bersamaan dengan itu, terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional dan netral; terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat; mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditandai oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas, dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan; meningkatnya kemampuan Iptek; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak; dan terwujudnya kesetaraan gender. Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, dan sumber daya alam, dan sektor jasa. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata, serta berfungsi dengan baik. Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan, dan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi; serta berkembangnya usaha dan investasi dari perusahaan-perusahaan domestik maupun perusahaan asing. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2028 mencapai kesejahteraan setara dengan kabupaten/kota lain di Indonesia yang berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang makin rendah. Kondisi maju dan mandiri dan berkeadilan makin terwujud dengan terselenggaranya jaringan transportasi, pos dan telematika yang memadai

bagi seluruh Masyarakat yang menjangkau sampai seluruh kelurahan di Kota Palangka Raya; tercapainya elektrifikasi dan air bersih Kelurahan dan untuk rumah tangga; serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh Masyarakat secara memadai.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang akan dicapai. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya dan terencana sedemikian rupa sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.



Pelantikan Pj. Wali Kota Palangka Raya (2023-2024)



Pelantikan Pj. Wali Kota Palangka Raya (2024-2025)

Dalam rangka memberikan arahan dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang tertuang dalam RPD 2024-2026, Pemerintah Kota Palangka Raya menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2024 murni dan perubahan sebagai dasar acuan pedoman dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 dan perubahan untuk menuju pada pencapaian sasaran strategis Kota Palangka Raya.



WALI KOTA PALANGKA RAYA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HERA NUGRAHAYU

Jabatan : Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Palangka Raya, 3 Januari 2024

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,

HERA NUGRAHAYU



**WALI KOTA PALANGKA RAYA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PERUBAHAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HERA NUGRAHAYU

Jabatan : Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Palangka Raya, 29 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,



[Handwritten Signature]
HERA NUGRAHAYU

Tabel. 2.4
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2024

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	TARGET 2024
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Prestasi Pemuda	Angka Harapan Lama Sekolah	14,98
		Angka Rata-Rata Lama Sekolah	11,55
		Jumlah Prestasi Pemuda Kota Palangka Raya pada tingkat Kota, Provinsi, Nasional dan Internasional	50
2	Meningkatnya Layanan dan Aksesibilitas Kesehatan	Angka Harapan Hidup	73,48
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	3,35%
4	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,64%
5	Meningkatnya Kualitas Sektor Pariwisata dan Kebudayaan	Jumlah event seni dan budaya	6
6	Terwujudnya pemerataan infrastruktur ekonomi maupun sosial antar kecamatan	Indeks Aksesibilitas wilayah	0,315
7	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	73,98

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	TARGET 2024
8	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis	Skor Pola Pangan Harapan	91,6
9	Meningkatnya Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Investasi PMDN	5,41%
10	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan di Kalangan Masyarakat	Persentase Penegakan Peraturan Daerah (PPPD)	100%
		Indeks Toleransi (IT)	13%
11	Meningkatnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berintegritas	Opini BPK	WTP
		Nilai SAKIP	BB
		Indeks Profesionalisme ASN	Kategori Sangat Rendah
		Indeks SPBE	2,75
12	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah	Indeks Perencanaan Daerah	90%
13	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas	IKM	B



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja diukur dengan melakukan pengumpulan data kinerja yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Data Kinerja dimaksud dilakukan verifikasi data internal guna menjaga keakuratan data. Kemudian capaian kinerja diukur dengan membandingkan realisasi dan target kinerja. Adapun penanggung jawab data kinerja tiap-tiap Indikator Kinerja sebagai berikut:

Tabel. 3.1
INDIKATOR KINERJA

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Prestasi Pemuda	Angka Harapan Lama Sekolah
		Angka Rata-Rata Lama Sekolah
		Jumlah Prestasi Pemuda Kota Palangka Raya pada tingkat Kota, Provinsi, Nasional dan Internasional
2	Meningkatnya Layanan dan Aksesibilitas Kesehatan	Angka Harapan Hidup
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH
4	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka
5	Meningkatnya Kualitas Sektor Pariwisata dan Kebudayaan	Jumlah event seni dan budaya
6	Terwujudnya pemerataan infrastruktur ekonomi maupun sosial antar kecamatan	Indeks Aksesibilitas wilayah
7	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)
8	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis	Skor Pola Pangan Harapan
9	Meningkatnya Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Investasi PMDN
10	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan di Kalangan Masyarakat	Persentase Penegakan Peraturan Daerah (PPPD)
		Indeks Toleransi (IT)
11	Meningkatnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berintegritas	Opini BPK
		Nilai SAKIP
		Indeks Profesionalisme ASN
		Indeks SPBE
12	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah	Indeks Perencanaan Daerah
13	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas	IKM

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran dan indikator sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi instansi pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing Indikator Kinerja Utama. Pengukuran kinerja meliputi perjanjian kinerja dan pengukuran indikator kinerja pada tiap-tiap sasaran dalam mewujudkan misi Kota Palangka Raya dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, dan pengukuran kinerja dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Rumus 1 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Rumus 2 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah tolak ukur skala peringkat kinerja tertuang sebagai berikut:

Tabel Skala Peringkat Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2. Hasil Sedang Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

1. MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN DAN PRESTASI PEMUDA

1) ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH

I. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Prestasi Pemuda	Angka Harapan Lama Sekolah	14,98	15,13	101%

Realisasi Angka Harapan Lama Sekolah sebesar 15,13 tahun, yang melampaui target 14,98 tahun, merupakan indikasi positif bahwa upaya peningkatan akses dan durasi pendidikan telah membuahkan hasil. Namun, agar pencapaian ini benar-benar optimal, perlu adanya perhatian yang lebih besar pada peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan akses di seluruh daerah, dan pemantauan komprehensif terhadap indikator-indikator pendukung lainnya. Dengan demikian, perbaikan dalam durasi pendidikan dapat diterjemahkan ke dalam peningkatan kompetensi dan daya saing sumber daya manusia di masa depan. Hal ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja (sangat tinggi).

II. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Prestasi Pemuda	Angka Harapan Lama Sekolah	15,13	101%	14,99	135,05 %	14,97	135%	9,87	89,24 %

Realisasi AHLS meningkat setiap tahun, tetapi laju kenaikannya mengalami perlambatan:

- Tahun 2021 ke 2022 → Lonjakan signifikan sebesar 5,10 tahun (dari 9,87 ke 14,97 tahun).

- Tahun 2022 ke 2023 → Hampir stagnan, peningkatan hanya 0,02 tahun.
- Tahun 2023 ke 2024 → Kenaikan 0,14 tahun, lebih baik dari 2023 tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan 2022.

Capaian menunjukkan persentase keberhasilan dibandingkan target yang ditetapkan.

- Tahun 2021 ke 2022 → Lonjakan capaian +45,76% (89,24% ke 135%), kemungkinan karena target rendah atau peningkatan besar dalam realisasi.
- Tahun 2022 ke 2023 → Stabil di sekitar 135%, hampir tidak ada perubahan (+0,05%).
- Tahun 2023 ke 2024 → Capaian turun drastis -34,05% (135,05% ke 101%), meskipun realisasi meningkat.

Realisasi AHLS meningkat setiap tahun, tetapi pertumbuhannya melambat sejak 2022. Capaian AHLS melonjak di 2022, stabil di 2023, dan turun drastis di 2024, kemungkinan karena target yang lebih tinggi. Tahun 2022 menjadi tahun terbaik dengan lonjakan realisasi dan capaian, sementara 2024 menunjukkan tantangan baru dalam pencapaian target pendidikan.

III. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	TARGET 2026	REALISASI 2024
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Prestasi Pemuda	Angka Harapan Lama Sekolah	15,00	15,13

Dengan pencapaian 15,13 tahun di 2024 dan target 2026 yang berada di 15,00 tahun sebenarnya sudah terlampaui. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja sektor pendidikan telah melampaui ekspektasi jangka menengah, dan memungkinkan untuk menetapkan target yang lebih ambisius ke

depan. Sehingga untuk target yang ingin dicapai menjadi lebih menantang dari target yang telah ada sehingga memupuk semangat Pemerintah Kota Palangka Raya agar lebih baik lagi dalam pelaksanaan urusan Pendidikan.

Realisasi Angka Harapan Lama Sekolah tahun 2024 mencapai 15,13 tahun, melampaui target tahun 2026 di angka 15,00 tahun, berarti capaian saat ini sudah sangat baik dan lebih tinggi dari rencana jangka menengah.

Ke depan, fokus utama adalah memastikan peningkatan AHLS diikuti dengan kualitas pendidikan yang lebih baik, mengurangi angka putus sekolah, serta meningkatkan akses bagi kelompok yang masih tertinggal. Dengan strategi yang tepat, pendidikan di Indonesia dapat semakin maju dan menciptakan SDM yang lebih unggul.

IV. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Perbandingan AHLS 15,13 dengan Standar Nasional 13,21

Aspek	Realisasi (15,13)	Standar Nasional (13,21)	Perbandingan
Jumlah Tahun Sekolah	15,13 tahun	13,21 tahun	Lebih tinggi 1,92 tahun
Capaian terhadap Standar	Melampaui standar	Sesuai rata-rata nasional	Realisasi lebih baik
Dampak terhadap Pendidikan	Indikasi pendidikan yang lebih maju	Masih dalam batas standar nasional	Lebih banyak individu bersekolah lebih lama

Realisasi angka harapan lama sekolah sebesar 15,13 tahun dibandingkan standar nasional 13,21 tahun menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik dari rata-rata nasional. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam sistem

pendidikan, tetapi juga perlu ditinjau lebih lanjut apakah kualitas pendidikan yang diberikan sejalan dengan peningkatan lama sekolah tersebut. Jika diperlukan analisis lebih lanjut, faktor-faktor lain seperti tingkat partisipasi pendidikan tinggi, kualitas pembelajaran, dan pemerataan akses pendidikan juga bisa ditinjau.

V. Analisis penyebab dari keberhasilan atau kegagalan serta peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Beberapa faktor yang mungkin berkontribusi terhadap pencapaian Angka Harapan Lama Sekolah yang melampaui target antara lain:

- ✓ Kebijakan pendidikan yang efektif dengan adanya program wajib belajar, beasiswa, atau bantuan operasional sekolah (BOS) yang mendorong anak-anak untuk tetap bersekolah.
- ✓ Aksesibilitas pendidikan yang meningkat melalui peningkatan jumlah sekolah, baik negeri maupun swasta, serta program pendidikan jarak jauh.
- ✓ Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan melalui kampanye dan sosialisasi dari pemerintah atau LSM yang berhasil mendorong anak-anak untuk menempuh pendidikan lebih lama.
- ✓ Dukungan ekonomi dan sosial melalui program bantuan sosial bagi keluarga kurang mampu, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH), yang membantu anak tetap bersekolah.

Alternatif Solusi untuk Meningkatkan atau Mempertahankan Capaian Angka Harapan Lama Sekolah antara lain :

- ✓ Meningkatkan akses pendidikan di daerah terpencil melalui Pembangunan sekolah baru, penguatan sekolah digital/online, serta peningkatan jumlah guru di daerah terpencil.
- ✓ Penguatan program beasiswa dan bantuan pendidikan untuk

Memastikan beasiswa dan bantuan operasional tepat sasaran untuk mencegah anak putus sekolah.

- ✓ Meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan kurikulum berbasis keterampilan (skill-based learning) agar tidak hanya lama belajar yang bertambah, tetapi juga kompetensi siswa meningkat.
- ✓ Kampanye pendidikan berkelanjutan dengan cara menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan tinggi dan menekan angka putus sekolah.
- ✓ Kolaborasi dengan sektor swasta melalui peningkatan program magang dan kerja sama dengan industri agar pendidikan lebih relevan dengan dunia kerja.

VI. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan membuat perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran. Kriteria perbandingan yang digunakan dalam analisis efisiensi sebagai berikut:

- a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan atau sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasara
- b. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan atau sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran.

Tingkat Efisiensi =	Persentase Rata-Rata Capaian Sasaran	x 100%

	Persentase Realisasi Anggaran	

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Sasaran	% capaian kinerja sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya kualitas pendidikan dan prestasi pemuda	3	136,62%	409.325.25.260,00	377.488.978.784,00	92%	149%	Efisien

VII. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

NO	SASARAN	PROGRAM
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Prestasi Pemuda	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAHAAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

2) ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH

I. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Prestasi Pemuda	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	11,55	11,66	101%

Capaian angka rata-rata lama sekolah sebesar 11,66 tahun yang melampaui target 11,55 tahun merupakan sinyal positif dalam upaya peningkatan akses dan partisipasi pendidikan. Meskipun peningkatan

sebesar 0,11 tahun atau sekitar 0,95% terbilang kecil, hal ini tetap menunjukkan kemajuan dalam sistem pendidikan. Keberhasilan ini harus terus diimbangi dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan akses di seluruh wilayah, serta evaluasi berkala terhadap indikator-indikator pendidikan lainnya. Dengan demikian, peningkatan ini dapat diartikan sebagai langkah maju dalam menciptakan sumber daya manusia yang lebih kompeten dan siap bersaing di era global. Hal ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja (sangat tinggi).

II. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Prestasi Pemuda	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	11,66	101%	11,65	98,31 %	11,55	97,5%	11,53	97,71 %

Secara umum, angka RLS mengalami peningkatan setiap tahun, meskipun kenaikannya cenderung kecil:

- Tahun 2021 ke 2022 → Kenaikan +0,02 tahun (dari 11,53 ke 11,55 tahun).
- Tahun 2022 ke 2023 → Peningkatan lebih besar sebesar +0,10 tahun (dari 11,55 ke 11,65 tahun).
- Tahun 2023 ke 2024 → Kenaikan +0,01 tahun (dari 11,65 ke 11,66 tahun), yang sangat kecil dibandingkan tahun sebelumnya.

Capaian RLS menunjukkan persentase pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan:

- Tahun 2021 ke 2022 → Capaian turun -0,21% (97,71% ke 97,50%).
- Tahun 2022 ke 2023 → Capaian naik +0,81% (97,50% ke 98,31%).

- Tahun 2023 ke 2024 → Capaian melonjak +2,69% (98,31% ke 101%).

RLS meningkat setiap tahun, tetapi sangat lambat (hanya naik 0,01 tahun pada 2024). Kenaikan capaian di 2024 menunjukkan target akhirnya tercapai, tetapi realisasi RLS masih membutuhkan dorongan lebih besar. Tahun 2023 menjadi tahun dengan peningkatan realisasi tertinggi (+0,10 tahun), sedangkan 2024 mengalami peningkatan paling kecil (+0,01 tahun).

III. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	TARGET 2026	REALISASI 2024
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Prestasi Pemuda	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	11,57	11,66

Dengan pencapaian 11,66 tahun di 2024, target untuk tahun 2026 yang hanya naik sedikit menjadi 11,57 tahun menandakan bahwa realisasi tahun 2024 sudah melampaui target jangka menengah. Ini berarti bahwa kinerja pendidikan telah melebihi proyeksi jangka menengah, dan memungkinkan pemerintah untuk menetapkan target yang lebih ambisius guna mendorong peningkatan lebih lanjut, pencapaian saat ini sudah melampaui harapan jangka menengah.

Ke depan, fokus utama adalah memastikan kenaikan ini diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan, memperluas akses ke pendidikan menengah dan tinggi, serta menekan angka putus sekolah. Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas.

IV. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Perbandingan ARLS 11,66 dengan Standar Nasional 8,85

Aspek	Realisasi (11,66 Tahun)	Standar Nasional (8,85 Tahun)	Perbandingan
Jumlah Tahun Sekolah	11,66 tahun	8,85 tahun	Lebih tinggi 2,81 tahun
Capaian terhadap Standar	Melampaui rata-rata nasional	Sesuai standar nasional	Realisasi jauh lebih baik
Tingkat Pendidikan Rata-rata	Setara dengan hampir tamat SMA	Setara dengan hampir tamat SMP	Lebih banyak individu menamatkan pendidikan menengah atas

Dengan ARLS 11,66 tahun yang lebih tinggi dibandingkan standar nasional 8,85 tahun, Kota Palangka Raya memiliki tingkat pendidikan rata-rata lebih tinggi, yang berpotensi meningkatkan kualitas SDM dan daya saing ekonomi.

Namun, tantangan yang perlu diperhatikan adalah:

- Apakah kualitas pendidikan yang diterima juga sebanding dengan lamanya waktu bersekolah?
- Apakah peningkatan ARLS berdampak pada pengurangan angka pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat?
- Apakah akses pendidikan tinggi juga tersedia bagi seluruh lapisan masyarakat, atau hanya untuk kelompok tertentu?

Untuk memastikan dampak positif yang berkelanjutan, pemerintah daerah bisa fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan vokasional, dan akses pendidikan tinggi.

V. Analisis penyebab dari keberhasilan atau kegagalan serta peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Beberapa faktor yang kemungkinan berkontribusi terhadap pencapaian target Angka Rata-Rata Lama Sekolah :

- ✓ Kebijakan pendidikan yang efektif melalui program wajib belajar 12 tahun dan berbagai program pendukung seperti BOS (Bantuan Operasional Sekolah) serta beasiswa membantu meningkatkan rata-rata lama sekolah.
- ✓ Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan melalui sosialisasi dari pemerintah, LSM, dan media meningkatkan pemahaman orang tua dan siswa tentang pentingnya menyelesaikan pendidikan menengah atau lebih tinggi.
- ✓ Dukungan ekonomi bagi keluarga kurang mampu dengan program bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH) membantu anak-anak tetap bersekolah.
- ✓ Fleksibilitas pendidikan dengan adanya sistem kejar paket, sekolah terbuka, dan program pendidikan non-formal membantu mereka yang sebelumnya putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan.

Alternatif Solusi untuk Peningkatan Ke Depan Angka Rata-Rata Lama Sekolah antara lain :

- ✓ Pemerataan akses pendidikan oleh pemerintah melalui pembangunan lebih banyak sekolah, memperkuat sekolah daring, dan memastikan distribusi tenaga pengajar yang lebih baik di daerah terpencil.
- ✓ Meningkatkan beasiswa dan bantuan pendidikan melalui program beasiswa untuk siswa dari keluarga kurang mampu serta insentif untuk mereka yang melanjutkan ke jenjang lebih tinggi.

- ✓ Pendidikan berbasis teknologi dengan cara mendorong penggunaan teknologi dalam pembelajaran untuk menjangkau lebih banyak siswa, terutama di daerah dengan akses terbatas.
- ✓ Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan tinggi melalui kampanye edukasi kepada masyarakat untuk menekan angka putus sekolah dan mendorong anak melanjutkan studi hingga minimal tingkat menengah atau lebih tinggi.

VI. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan membuat perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran. Kriteria perbandingan yang digunakan dalam analisis efisiensi sebagai berikut:

- a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan atau sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran
- b. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan atau sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran.

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Persentase Rata-Rata Capaian Sasaran}}{\text{Persentase Realisasi Anggaran}} \times 100\%$$

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Sasaran	% capaian kinerja sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya kualitas pendidikan dan prestasi pemuda	3	136,62%	409.325.25.260,00	377.488.978.784,00	92%	149%	Efisien

VII. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

NO	SASARAN	PROGRAM
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Prestasi Pemuda	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

3) JUMLAH PRESTASI PEMUDA KOTA PALANGKA RAYA PADA TINGKAT KOTA, PROVINSI, NASIONAL DAN INTERNASIONAL

I. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Prestasi Pemuda	Jumlah Prestasi Pemuda Kota Palangka Raya pada tingkat Kota, Provinsi, Nasional dan Internasional	50	125	250%

Jumlah Prestasi Pemuda Kota Palangka Raya Pada Tingkat Kota, Provinsi, Nasional dan Internasional	
NAMA	JUMLAH
KEPEMUDAAN	
PASKIBRA TK KOTA	55
PASKIBRA TK PROV	3
PASKIBRA TK NASIONAL	1
KEOLAHRAGAAN	
PRAPOPNAS TK PROV	57
PEKAN OLAHRAGA NASIONAL	9
TOTAL	125

Sumber Data: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Palangka Raya

Prestasi pemuda Kota Palangka Raya yang di capai pada tahun 2024 ini sebanyak 125 prestasi yang meliputi Paskibraka, Prapopnas dan PON. Berdasarkan target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah, prestasi yang diharapkan berjumlah 50 prestasi. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian pada tahun 2024 sebesar 250%. Hal ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja (sangat tinggi).

II. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Prestasi Pemuda	Jumlah Prestasi Pemuda Kota Palangka Raya pada tingkat Kota, Provinsi, Nasional dan Internasional	125	250%	Berbeda IKU antara RPJMD 2018-2023 dengan RPD 2024-2026					

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya periode 2024-2026 Indikator Daerah jumlah prestasi pemuda Kota Palangka Raya pada tingkat Kota, Provinsi, Nasional dan Internasional tidak memiliki perbandingan dengan tahun tahun sebelumnya, dikarenakan Indikator ini merupakan Indikator Daerah baru yang tidak terdapat pada RPJMD lalu. Sebagai penanggung jawab indikator tersebut adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga dimana pada tahun 2021,2022 dan 2023 indikator yang ikut diampu Perangkat Daerah tersebut adalah sebagai berikut :

Indikator	Realisasi 2023	Capaian 2023	Realisasi 2022	Capaian 2022	Realisasi 2021	Capaian 2021
Harapan Lama Sekolah	14,99	135,05%	14,97	135%	9,87	89,24%
Rata-rata Lama Sekolah	11,65	98,31%	11,55	97,5%	11,53	97,71%
Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	1,49	36,88%	1,42	35%	7,18	176,85%

Pada RPJMD Kota Palangka Raya, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga mengampu indikator Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang bersanding dengan Dinas Pendidikan. Sedangkan untuk indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Paertanian bersanding dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Dinas Perikanan.

III. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	TARGET 2026	REALISASI 2024
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Prestasi Pemuda	Jumlah Prestasi Pemuda Kota Palangka Raya pada tingkat Kota, Provinsi, Nasional dan Internasional	70	125

Realisasi 2024 melampaui target 2026 dengan pencapaian 125 prestasi, realisasi ini bahkan hampir dua kali lipat dari target 2026.

Realisasi jumlah prestasi pemuda tahun 2024 mencapai 125 prestasi, yang berarti jauh melampaui target hingga 2026. Keberhasilan ini mengindikasikan efektivitas program pembinaan pemuda, sehingga target jangka menengah perlu direvisi naik agar lebih mencerminkan realitas pencapaian. Selain itu, strategi keberlanjutan harus diperkuat untuk memastikan prestasi pemuda tetap meningkat di tahun-tahun mendatang.

IV. Analisis penyebab dari keberhasilan atau kegagalan serta peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Beberapa faktor yang kemungkinan besar berkontribusi terhadap pencapaian ini antara lain:

- ✓ Dukungan dari pemerintah dan institusi pendidikan melalui program pelatihan, beasiswa, serta pendanaan untuk kompetisi telah membantu pemuda dalam mengembangkan potensi mereka.
- ✓ Peningkatan akses terhadap kompetisi melalui lebih banyak event atau ajang perlombaan di tingkat kota, provinsi, nasional, dan internasional memberi peluang lebih besar bagi pemuda untuk berprestasi.
- ✓ Penguatan pembinaan dan pendampingan melalui pembinaan intensif dari pelatih, guru, atau mentor yang membantu pemuda lebih siap menghadapi kompetisi.
- ✓ Meningkatnya minat dan partisipasi pemuda dalam berbagai bidang dengan cara meningkatkan kesadaran pemuda untuk berkompetisi dan menunjukkan potensi mereka semakin tinggi, baik dalam bidang akademik, olahraga, seni, maupun teknologi.
- ✓ Kemajuan teknologi dan informasi memberikan Kemudahan dalam mengakses informasi tentang kompetisi, pelatihan online, dan berbagi pengalaman dengan para ahli telah membantu pemuda berkembang lebih cepat.
- ✓ Kolaborasi dengan sektor swasta dan komunitas melalui peran swasta, organisasi, dan komunitas dalam menyediakan program pelatihan dan pendanaan turut mendorong peningkatan prestasi pemuda.

Alternatif Solusi untuk Mempertahankan dan Meningkatkan Prestasi Pemuda Kota Palangka Raya pada Tingkat Kota, Provinsi, Nasional dan Internasional antara lain :

- ✓ Meningkatkan program pembinaan dan pendampingan dengan cara memastikan adanya pelatihan berkelanjutan yang didukung oleh tenaga ahli dan mentor yang berkualitas.
- ✓ Pemerataan akses dan peluang melalui pemberian fasilitas dan pelatihan bagi pemuda di daerah terpencil agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi.
- ✓ Penguatan infrastruktur dan sarana latihan dengan cara pembangunan pusat pelatihan yang lebih lengkap untuk bidang akademik, olahraga, seni, dan teknologi agar pemuda memiliki tempat yang layak untuk mengembangkan potensinya.
- ✓ Pengelolaan mental dan kesejahteraan atlet/siswa berprestasi dengan cara menyediakan layanan psikologi atau konseling bagi pemuda yang menghadapi tekanan tinggi akibat persaingan ketat di dunia kompetisi.
- ✓ Kolaborasi dengan lebih banyak pihak dengan mengajak lebih banyak institusi, komunitas, dan perusahaan untuk mendukung pengembangan bakat pemuda melalui sponsorship, pelatihan, atau magang.

V. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan membuat perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran. Kriteria perbandingan yang digunakan dalam analisis efisiensi sebagai berikut:

- a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan atau sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran
- b. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan atau sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran.

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Persentase Rata-Rata Capaian Sasaran}}{\text{Persentase Realisasi Anggaran}} \times 100\%$$

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Sasaran	% capaian kinerja sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya kualitas pendidikan dan prestasi pemuda	3	136,62%	409.325.25.260,00	377.488.978.784,00	92%	149%	Efisien

VI. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

NO	SASARAN	PROGRAM
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Prestasi Pemuda	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

2. MENINGKATNYA LAYANAN AKSESIBILITAS KESEHATAN

1) ANGKA HARAPAN HIDUP

I. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Meningkatnya Layanan dan Aksesibilitas Kesehatan	Angka Harapan Hidup	73,48	73,82	100%

Kabupaten/Kota	[Metode Baru] Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah (tahun)		
	2022	2023	2024
Kalimantan Tengah	70,04	70,27	70,43
Kotawaringin Barat	70,98	71,28	71,38
Kotawaringin Timur	70,15	70,39	70,51
Kapuas	69,02	69,23	69,34
Barito Selatan	67,48	67,75	67,86
Barito Utara	71,50	71,68	71,80
Sukamara	71,80	72,03	72,15
Lamandau	69,62	69,84	69,98
Seruyan	69,46	69,63	69,72
Katingan	66,16	66,43	66,52
Pulang Pisau	68,36	68,60	68,74
Gunung Mas	70,72	70,96	71,10
Barito Timur	68,61	68,91	69,02
Murung Raya	69,75	69,94	70,04
Palangka Raya	73,47	73,70	73,82

Keterangan Data :
Sumber: BPS

Angka Harapan Hidup didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka harapan hidup menggambarkan seberapa lama peluang seseorang untuk bertahan hidup, dianggap sebagai indikator umum bagi taraf hidup. Tingginya umur harapan hidup menunjukkan taraf hidup suatu negara atau daerah yang juga tinggi, begitu juga sebaliknya jika umur harapan rendah maka taraf hidup suatu daerah tersebut juga rendah. Selain indikator bagi taraf hidup, angka harapan hidup juga memperlihatkan derajat kesehatan masyarakat di suatu daerah bahkan negara. Semakin tinggi angka harapan hidup mencerminkan semakin tingginya derajat kesehatan di suatu wilayah karena seseorang yang hidup panjang cenderung didukung dengan kondisi kesehatan yang baik. Angka harapan hidup juga merupakan salah satu indikator dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana sebagai representasi dari dimensi

kesehatan pada suatu daerah . Untuk target Angka Harapan Hidup Kota Palangka Raya pada tahun 2024 yaitu 73,48 dengan realisasi 73,82 atau besar capaian sebesar 100%. Dari realisasi dan capaian tersebut menunjukkan bahwa umur harapan hidup masyarakat di Kota Palangka Raya menyentuh pada umur 73 hingga 74 tahun. Hal ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja (sangat tinggi).

II. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021
2	Meningkatnya Layanan dan Aksesibilitas Kesehatan	Angka Harapan Hidup	73,82	100%	73,70	100,70 %	73,47	100,3%	73,24	100,10 %

Secara umum, angka harapan hidup mengalami peningkatan setiap tahun, tetapi dengan laju pertumbuhan yang berbeda:

- Tahun 2021 ke 2022 → Kenaikan +0,23 tahun (73,24 ke 73,47 tahun).
- Tahun 2022 ke 2023 → Kenaikan +0,23 tahun (73,47 ke 73,70 tahun), sama seperti tahun sebelumnya.
- Tahun 2023 ke 2024 → Kenaikan hanya +0,12 tahun (73,70 ke 73,82 tahun), menunjukkan perlambatan pertumbuhan.

Capaian AHH menunjukkan pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan:

- Tahun 2021 ke 2022 → Capaian naik +0,20% (100,10% ke 100,30%).
- Tahun 2022 ke 2023 → Capaian naik +0,40% (100,30% ke 100,70%).
- Tahun 2023 ke 2024 → Capaian turun -0,70% (100,70% ke 100%).

AHH terus meningkat setiap tahun, tetapi pertumbuhannya mulai melambat pada 2024. Capaian AHH turun menjadi 100% pada 2024,

kemungkinan karena target yang lebih tinggi atau faktor lain yang menghambat peningkatan. Faktor kesehatan masyarakat, ekonomi, dan kebijakan kesehatan berperan dalam tren AHH ini.

III. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	TARGET 2026	REALISASI 2024
2	Meningkatnya Layanan dan Aksesibilitas Kesehatan	Angka Harapan Hidup	73,50	73,82

Dengan pencapaian 73,82 tahun pada 2024, angka ini sudah melebihi target jangka menengah hingga 2026. Bahkan, realisasi ini lebih tinggi 0,33 tahun dari target 2026.

Realisasi Angka Harapan Hidup tahun 2024 sebesar 73,82 tahun telah melampaui target hingga 2026. Keberhasilan ini menunjukkan perbaikan dalam kualitas layanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, target AHH untuk tahun-tahun mendatang perlu direvisi naik, serta kebijakan kesehatan harus diperkuat untuk menjaga dan meningkatkan tren positif ini.

IV. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Perbandingan AHH 73,82 dengan Standar Nasional 74,15

Aspek	Realisasi (73,82 Tahun)	Standar Nasional (74,15 Tahun)	Perbandingan
Usia Harapan Hidup	73,82 tahun	74,15 tahun	Lebih rendah 0,33 tahun
Kualitas Kesehatan Penduduk	Hampir setara dengan rata-rata nasional	Standar nasional lebih tinggi	Sedikit lebih rendah
Faktor yang Mempengaruhi	Akses kesehatan, pola hidup, faktor ekonomi	Lebih baik secara nasional	Perlu evaluasi faktor penyebab

Meskipun AHH 73,82 tahun hanya terpaut 0,33 tahun lebih rendah dari standar nasional (74,15 tahun), tetap perlu diperhatikan faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab selisih ini.

Fokus utama untuk peningkatan AHH dapat dilakukan melalui:

- Peningkatan layanan kesehatan, terutama akses dan kualitas pelayanan.
- Peningkatan kesadaran hidup sehat, termasuk kampanye pola makan sehat dan aktivitas fisik.
- Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan, agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dengan baik.
- Perbaikan lingkungan, termasuk akses air bersih, sanitasi, dan pengelolaan polusi.

Jika strategi ini diterapkan, bukan hanya angka harapan hidup yang meningkat, tetapi juga kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

V. Analisis penyebab dari keberhasilan atau kegagalan serta peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Beberapa faktor yang kemungkinan besar berkontribusi terhadap peningkatan Angka Harapan Hidup sebagai berikut:

- ✓ Peningkatan layanan kesehatan melalui akses ke fasilitas kesehatan yang lebih baik, peningkatan jumlah tenaga medis, serta ketersediaan obat-obatan membantu meningkatkan angka harapan hidup.
- ✓ Kesadaran masyarakat tentang kesehatan meningkat melalui kampanye tentang pola hidup sehat, gizi seimbang, dan olahraga semakin populer, berkontribusi pada peningkatan umur panjang.
- ✓ Perbaikan gizi dan pola makan dengan cara meningkatkan kesadaran tentang pentingnya nutrisi yang baik sejak bayi hingga lanjut usia membantu mencegah penyakit degeneratif.

- ✓ Peningkatan sanitasi dan akses air bersih melalui infrastruktur sanitasi yang lebih baik serta akses air bersih yang meningkat berperan dalam mengurangi penyakit yang disebabkan oleh lingkungan tidak sehat.
- ✓ Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkualitas melalui Program jaminan kesehatan nasional (BPJS Kesehatan).

Alternatif Solusi untuk Meningkatkan atau Mempertahankan Angka Harapan Hidup sebagai berikut :

- ✓ Pemerataan akses layanan kesehatan melalui pembangunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil, meningkatkan jumlah tenaga medis, serta memperluas layanan telemedicine agar seluruh masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan yang setara.
- ✓ Mengintensifkan kampanye tentang pentingnya pola makan sehat, olahraga teratur, dan pengelolaan stres untuk mencegah penyakit tidak menular.
- ✓ Memperluas cakupan imunisasi, pemeriksaan kesehatan berkala, serta skrining dini untuk mendeteksi penyakit sejak awal.
- ✓ Memastikan ketersediaan air bersih, sanitasi yang lebih baik, serta mengurangi pencemaran udara yang berdampak pada kesehatan masyarakat.
- ✓ Mengurangi angka kematian akibat kecelakaan dengan meningkatkan kesadaran keselamatan berkendara dan standar keamanan di tempat kerja.
- ✓ Meningkatkan fasilitas konseling dan psikologi di layanan kesehatan serta mendorong kampanye kesadaran mental di masyarakat.

- ✓ Mengurangi polusi udara, mencegah penyebaran penyakit akibat perubahan iklim, serta memperkuat sistem respons terhadap bencana alam yang bisa berdampak pada kesehatan masyarakat.

VI. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan membuat perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran. Kriteria perbandingan yang digunakan dalam analisis efisiensi sebagai berikut:

- Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan atau sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasara
- Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan atau sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran.

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Persentase Rata-Rata Capaian Sasaran}}{\text{Persentase Realisasi Anggaran}} \times 100\%$$

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Sasaran	% capaian kinerja sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya layanan dan aksesibilitas kesehatan	1	100%	253.912.024.429,00	231.130.802.857,02	91%	110%	Efisien

VII. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

NO	SASARAN	PROGRAM
2	Meningkatnya Layanan dan Aksesibilitas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

3. MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1) ANGKA KEMISKINAN

I. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	3,35%	3,52	95%

Target angka kemiskinan sebesar 3,35 menunjukkan sasaran pengurangan kemiskinan yang telah ditetapkan. Realisasi yang dicapai sebesar 3,52 mengindikasikan bahwa kondisi kemiskinan sedikit lebih tinggi dari target yang diharapkan. Artinya, capaian kemiskinan 3,52 berada sekitar 5% lebih tinggi dari target 3,35. Meskipun perbedaan 0,17 persen terbilang kecil, realisasi yang lebih tinggi dari target menunjukkan adanya celah dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dari realisasi tersebut capaian kinerja berada pada nilai 95%.

Meskipun realisasi angka kemiskinan sebesar 3,52 hanya sedikit lebih tinggi daripada target 3,35, hal ini mengindikasikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan masih perlu ditingkatkan. Analisis mendalam menunjukkan bahwa faktor ekonomi makro, implementasi kebijakan, dan distribusi akses layanan dasar merupakan area kunci yang perlu mendapat perhatian. Dengan evaluasi program secara terus-menerus dan penyesuaian kebijakan yang lebih tepat sasaran, diharapkan target pengurangan kemiskinan dapat tercapai dan bahkan diturunkan lebih lanjut, sehingga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dapat meningkat. Hal ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja (sangat tinggi).

II. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	3,52%	95%	4,71%	48,75%	10,62%	91,24%	3,75%	161,42 %

Secara umum, angka kemiskinan mengalami peningkatan dan penurunan per tahunnya :

- 2021 ke 2022 → Angka kemiskinan melonjak drastis dari 3,75% menjadi 10,62% (+6,87%), menunjukkan adanya lonjakan kemiskinan yang sangat signifikan.
- 2022 ke 2023 → Terjadi perbaikan dengan penurunan angka kemiskinan sebesar -5,91%, menandakan pemulihan ekonomi mulai berjalan.
- 2023 ke 2024 → Angka kemiskinan kembali turun menjadi 3,52% (-1,19%), menunjukkan bahwa tren penurunan berlanjut namun dengan kecepatan yang lebih lambat.

Capaian angka kemiskinan menunjukkan keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan:

- 2021 ke 2022 → Capaian turun drastis dari 161,42% menjadi 91,24% (-70,18%), seiring dengan kenaikan tajam angka kemiskinan.
- 2022 ke 2023 → Capaian kembali turun menjadi 48,75% (-42,49%), menunjukkan bahwa meskipun kemiskinan menurun, pencapaian target masih jauh dari optimal.
- 2023 ke 2024 → Capaian meningkat tajam menjadi 95% (+46,25%), menandakan bahwa penurunan angka kemiskinan semakin mendekati target yang diharapkan.

Angka kemiskinan meningkat drastis pada 2022 tetapi kembali turun pada 2023-2024. Capaian kemiskinan sempat anjlok pada 2022-2023 tetapi membaik pada 2024 (95%), menunjukkan bahwa kebijakan

pengentasan kemiskinan mulai efektif. Jika tidak ada intervensi yang lebih kuat, angka kemiskinan bisa sulit turun lebih jauh pada tahun-tahun mendatang.

III. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	TARGET 2026	REALISASI 2024
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	3,34%	3,52%

Dengan pencapaian 3,52% pada tahun 2024, maka target 2026 masih lebih rendah dibandingkan realisasi saat ini. Ini berarti perlu upaya lebih besar untuk menurunkan angka kemiskinan agar sejalan dengan target jangka menengah.

Realisasi angka kemiskinan tahun masih jauh dari target jangka menengah 2026 (3,34%). Ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan masih perlu diperkuat. Langkah-langkah seperti meningkatkan lapangan kerja, mengendalikan inflasi, serta memperbaiki efektivitas bantuan sosial menjadi kunci utama dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

IV. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Perbandingan Angka Kemiskinan 3,52% dengan Standar Nasional 8,57%

Aspek	Realisasi (3,52%)	Standar Nasional (8,57%)	Perbandingan
Tingkat Kemiskinan	3,52%	8,57%	Lebih rendah 5,05%
Jumlah Penduduk Miskin	Lebih sedikit	Lebih banyak	Kesejahteraan lebih baik
Kesejahteraan Penduduk	Lebih tinggi	Rata-rata nasional lebih rendah	Wilayah lebih maju secara ekonomi
Faktor Penyebab	Kemungkinan ekonomi lebih kuat, akses pendidikan & pekerjaan lebih baik	Masih banyak daerah dengan kemiskinan tinggi	Perlu analisis faktor sukses

Angka kemiskinan 3,52% jauh lebih rendah dibandingkan standar nasional 8,57% menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik. Keberhasilan ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kebijakan sosial yang efektif.

Namun, ada tantangan yang tetap perlu diperhatikan:

- Apakah kesejahteraan ini merata di semua kelompok masyarakat?
- Apakah ada potensi kenaikan kemiskinan jika ekonomi mengalami guncangan?
- Bagaimana kualitas hidup masyarakat yang keluar dari kemiskinan?

V. Analisis penyebab dari keberhasilan atau kegagalan serta peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Beberapa faktor yang mungkin menyebabkan angka kemiskinan lebih tinggi dari target:

- ✓ Kenaikan harga bahan pokok dan kebutuhan dasar akibat inflasi serta gejolak ekonomi global bisa meningkatkan jumlah penduduk miskin.
- ✓ Lapangan pekerjaan yang belum optimal. Meskipun pertumbuhan ekonomi membaik, penciptaan lapangan kerja mungkin belum cukup untuk menyerap tenaga kerja secara luas, terutama di sektor informal.
- ✓ Ketimpangan pembangunan antarwilayah, dimana daerah terpencil mungkin masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, yang memperlambat pengurangan kemiskinan.

- ✓ Krisis akibat bencana alam atau pandemi. Faktor seperti pandemi, cuaca ekstrem, atau bencana alam dapat menyebabkan kehilangan mata pencaharian dan meningkatkan angka kemiskinan.
- ✓ Efektivitas program bantuan sosial seperti program bantuan sosial seperti PKH (Program Keluarga Harapan) atau BLT (Bantuan Langsung Tunai) kurang tepat sasaran atau tidak cukup besar, dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan bisa kurang maksimal.
- ✓ Pendidikan dan keterampilan yang masih rendah sehingga Banyak masyarakat miskin memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan, sehingga sulit mendapatkan pekerjaan yang layak.
- ✓ UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) sebagai penggerak ekonomi masyarakat masih menghadapi tantangan dalam mengakses modal, sehingga sulit berkembang dan menciptakan lapangan kerja.

Alternatif Solusi untuk Menurunkan Angka Kemiskinan antara lain :

- ✓ Menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dimana Pemerintah perlu mempercepat investasi, mendukung sektor industri, dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar dapat terserap di berbagai sektor pekerjaan.
- ✓ Meningkatkan efektivitas program bantuan sosial melalui kepastian bantuan tepat sasaran dan mendukung kemandirian ekonomi penerima, misalnya dengan program pendampingan dan pelatihan keterampilan.
- ✓ Mempermudah akses modal, memberikan pelatihan kewirausahaan, serta membantu pemasaran produk UMKM agar masyarakat miskin dapat meningkatkan pendapatannya.

- ✓ Memberikan beasiswa dan pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan industri agar masyarakat miskin memiliki kompetensi yang sesuai dengan pasar kerja.
- ✓ Memastikan akses jalan, listrik, internet, dan layanan dasar agar daerah terpencil bisa berkembang dan masyarakatnya lebih mudah mendapatkan pekerjaan atau peluang usaha.
- ✓ Mengendalikan inflasi dan harga kebutuhan pokok melalui kebijakan subsidi atau distribusi bahan pangan yang lebih baik agar daya beli masyarakat tidak semakin menurun.
- ✓ Mendorong masyarakat miskin untuk memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan pendapatan, serta memperluas akses terhadap layanan keuangan seperti kredit usaha rakyat (KUR) dan tabungan inklusif.

VI. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan membuat perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran. Kriteria perbandingan yang digunakan dalam analisis efisiensi sebagai berikut:

- a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan atau sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran
- b. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan atau sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran.

Tingkat Efisiensi =	$\frac{\text{Persentase Rata-Rata Capaian Sasaran}}{\text{Persentase Realisasi Anggaran}} \times 100\%$
----------------------------	---

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Sasaran	% capaian kinerja sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	1	95%	15.991.024.722,00	15.583113.362,00	97%	98%	Tidak Efisien

Walaupun dalam perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya dalam peningkatan kesejahteraan khususnya dalam indikator penurunan Angka Kemiskinan Kota Palangka Raya telah melakukan Langkah konkrit dalam penurunan kemiskinan di Kota Palangka Raya antara lain:

1. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat melalui :
 - ✓ Pendataan Usia Angkatan Kerja/Pengangguran
 - ✓ Pelatihan Bekerja dan Berusaha
 - ✓ Pendidikan Kewirausahaan
 - ✓ Pendataan Potensi dan Pengembangan UMKM
 - ✓ Pendataan Potensi Pengembangan IKM
 - ✓ Bantuan Peralatan Usaha bagi UMKM
 - ✓ Pelatihan IKM
 - ✓ Penanganan sampah menjadi barang ekonomis
 - ✓ Pelatihan Pengolahan Ikan untuk Masyarakat
2. Meminimalkan Kantong-kantong Kemiskinan melalui :
 - ✓ Penyiapan Aplikasi Intervensi Kemiskinan
 - ✓ Kajian Kemiskinan/ City Of The Lake
 - ✓ Pembangunan Ruangan di SDN 1 Kameloh Baru
 - ✓ Pembangunan Ruangan di SMPN Satap 3 Palangka Raya
 - ✓ Pembangunan Jembatan Titian
 - ✓ Pelatihan Kelompok Sadar Wisata
 - ✓ Pengadaan Sarana Persampahan
3. Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat
 - ✓ BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

- ✓ Pelayanan Administrasi Perekanaan Kependudukan/Jebol berbagi Data (Akta Kelahiran, KTP, KK)
- ✓ Penyaluran Kartu PANDOHOP ITAH
- ✓ Bantuan Paket Sembako kepada masyarakat miskin, kemiskinan ekstrim, dan stunting
- ✓ Permakanan Lansia Pemberian permakanan kepada lanjut usia yang termasuk dalam prioritas Standar Pelayanan Minimal Sosial (SPM)
- ✓ UHC/Pengobatan (Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan)
- ✓ Pengusulan Penerima PIP Untuk Tahun 2024 ada 2 fase semester Ganjil dan Genap untuk Kelurahan Kameloh Baru Jenjang SD dan SMP
- ✓ Bea Siswa bagi Anak lulusan sma untuk perguruan tinggi bagi warga asli Kel. Kameloh Baru dan setelah lulus harus mengabdikan
- ✓ Operasi Pasar Murah
- ✓ Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Intervensi terhadap Masyarakat Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim

BANTUAN PANDOHOP ITAH (PAKET SEMBAKO)



Program Bantuan PANDOHOP ITAH adalah pemberian bantuan sembako selama 1 tahun dengan sasaran penerima bantuan Masyarakat Miskin sebanyak 909 KK (3.162 jiwa) dan Kemiskinan Ekstrem 69 jiwa dan target stunting 122 jiwa. Pemberian bantuan berdasarkan SK Wali Kota Palangka Raya Nomor 188.45/230/2024 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Sembako Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024 Di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2024.

Penyaluran	Jenis Penerima Bantuan	Jumlah Penerima
Januari - Februari	Masyarakat Miskin	909 KK
	Kemiskinan Ekstrem	69 Jiwa
Maret - April	Masyarakat Miskin	923 KK
	Kemiskinan Ekstrem	55 Jiwa
Mei - Juni	Masyarakat Miskin	925 KK
	Kemiskinan Ekstrem	53 Jiwa

Bantuan PANDOHOP ITAH berupa paket sembako disalurkan setiap bulan dengan rincian beras 5kg, gula 1kg, dan minyak goreng 1L, dengan nominal sebesar Rp. 131.400. Penyaluran sembako bekerja sama dengan PT. Bulog Persero, Tbk dan disalurkan sampai dengan Desember 2024.

Berdasarkan DPA Dinas Sosial Kota Palangka Raya, anggaran untuk paket sembako sebesar Rp. 1.734.480.000,00. Sampai bulan Juni 2024 sudah terealisasi 44,45% yaitu sebesar Rp. 771.055.200,00

Penyaluran telah dilakukan pada periode Maret-April sebanyak 923 KK dan 55 jiwa sedangkan bulan Mei-Juni sebanyak 925 KK dan 53 jiwa.

Dalam periode berjalan, penyaluran Maret-Juni terdapat 16 jiwa penerima bantuan dari Kemiskinan Ekstrem yang dinyatakan pindah dan meninggal. Selanjutnya akan dilakukan validasi ulang terhadap penerima bantuan tersebut sebagai pengganti yang diusulkan dari Kelurahan. Dari hasil validasi tersebut, kelurahan mengusulkan pengganti penerima manfaat dari keluarga miskin yang masuk DTKS sebanyak 14 KK pada periode Maret- April 2024 dan 2 KK pada periode Mei – Juni 2024 sehingga total pergantian sebanyak 16 KK.

Realisasi Bantuan Pandohop Itah Pada periode Maret-Juni Tahun 2024 sebanyak:

- a. Masyarakat miskin 923 KK (Maret-April) & 925 KK (Mei-Juni)
- b. Kemiskinan Ekstrem 55 Jiwa (Maret-April) & 53 Jiwa (Mei-Juni)

Intervensi terhadap Masyarakat Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim

USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP)

Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) adalah bantuan pengembangan usaha perorangan yang diberikan kepada 104 orang dengan besaran bantuan Rp. 2.500.000,00.

Pemberian Bantuan berdasarkan SK Wali Kota Palangka Raya Nomor 188.45/195/2024 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Pengembangan Usaha Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024 Di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2024



Realisasi:

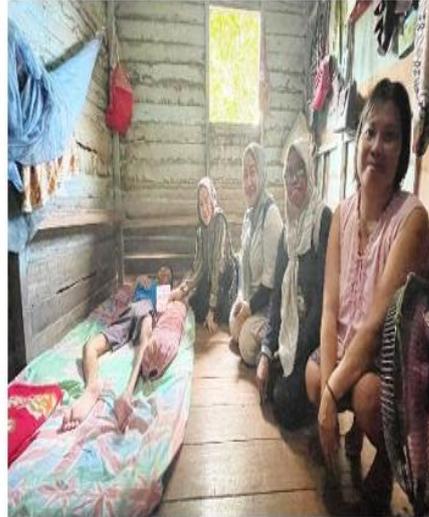
- Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) telah tersalur di bulan April 2024 Kepada 104 Orang, dengan besaran Rp2.500.000,00 per orang
- Selama kurun 4 bulan dari Maret-Juni 2024, telah dilakukan pendampingan usaha oleh pendamping sosial kepada setiap penerima bantuan.
- Bulan Juli-September akan dilakukan evaluasi berdasarkan hasil pendampingan usaha oleh pendamping sosial.

PENDAMPINGAN DAN MONITORING USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP)

Dokumentasi Pendampingan dan Monitoring yang dilakukan pada Juni 2024 dengan strategi pembagian wilayah sebagai berikut :



DOKUMENTASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PERMAKINAN DAN SANDANG UNTUK PPKS SPM



- Penyaluran bantuan sosial permaikanan dan sandang an Sunarto Penyandang Disabilitas Fisik, waktu penyaluran tanggal 14 Juni 2024 di Bank Kalteng Cabang Utama RTA Milono
- Penyaluran bantuan sosial permaikanan dan sandang an Bimo Yudo Rizko Saputra Penyandang Disabilitas Fisik, waktu penyaluran tanggal 28 Juni 2024 di Jalan Flamboyan Bawah Kelurahan Langkai
- Penyaluran bantuan sosial permaikanan dan sandang an Nansi Laniut Usia Terlantar, waktu penyaluran tanggal 19 Juni 2024 di Jalan Dulin Kandang Kelurahan Bukit Tunggal

Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Kameloh Baru oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palangka Raya



1. Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bertujuan untuk memperbaiki kondisi rumah baik secara menyeluruh maupun sebagian sehingga tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal
2. Dari 53 RTLH akan diberikan bantuan di kelurahan Kameloh Baru sebanyak 5 KK

Operasi Pasar Murah Sebako di Kelurahan Danau Tundai dan Bereng Bengkel oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya



Pelaksanaan Operasi Pasar Murah selain untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok, juga bertujuan untuk menyediakan bahan-bahan pokok dengan harga murah sehingga terjangkau bagi masyarakat Kota Palangka Raya.

VII. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

NO	SASARAN	PROGRAM
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA

4. MENINGKATNYA DAYA SAING TENAGA KERJA

1) TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

I. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,64%	5,02	112%

Kabupaten/Kota/Provinsi	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota	
	2023	2024
Kotawaringin Barat	4,45	4,42
Kotawaringin Timur	4,77	4,63
Kapuas	3,66	3,61
Barito Selatan	4,33	4,12
Barito Utara	4,85	4,71
Sukamara	5,23	4,95
Lamandau	3,32	3,17
Seruyan	3,61	3,47
Katingan	4,96	4,88
Pulang Pisau	2,07	1,99
Gunung Mas	3,24	3,12
Barito Timur	3,37	3,26
Murung Raya	2,75	2,90
Palangka Raya	5,13	5,02
Kalimantan Tengah	4,10	4,01

Keterangan Data :
Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Agustus) Keterangan: Angka 2011-2013 merupakan hasil Backcasting penimbang Proyeksi SP2010. Angka 2018-2019 merupakan hasil Backcasting penimbang SUPAS 2015. Sakernas 2016 Tidak Untuk Estimasi Level Kabupaten/Kota. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota

Berdasarkan data BPS Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 sebesar 5,02 persen. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 5,02% berarti bahwa dari total angkatan kerja, sekitar 5,02% di antaranya tidak memiliki pekerjaan atau menganggur.

Contoh:

- Jumlah angkatan kerja: 100.000 orang
- Jumlah pengangguran: 5.020 orang (5,02% dari 100.000)

Artinya, dari 100.000 orang yang berusia kerja, 5.020 orang di antaranya tidak memiliki pekerjaan atau menganggur.

Tingkat pengangguran terbuka yang relatif tinggi dapat menunjukkan beberapa hal, seperti:

- Keterbatasan lapangan kerja
- Kurangnya keterampilan atau pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan industri
- Perubahan struktur ekonomi atau industri

Namun, perlu diingat bahwa tingkat pengangguran terbuka juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti perubahan demografi, perubahan kebijakan ekonomi, dan lain-lain. Berdasarkan target yang ditetapkan yaitu 5,64, Tingkat Pengangguran Terbuka Pada tahun 2024 berada pada nilai 5,02 atau mengalami keberhasilan melebihi target yang ditetapkan sebesar 0,62 atau dengan capaian sebesar 112%. Hal ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja (sangat tinggi).

II. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021
4	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,02%	112%	5,13%	110,31 %	5,64%	102%	5,86%	99,66%

Secara umum, Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami peningkatan tiap tahunnya :

- 2021 ke 2022 → TPT turun dari 5,86% menjadi 5,64% (-0,22%), menunjukkan adanya pemulihan pascapandemi COVID-19, meskipun masih lambat.
- 2022 ke 2023 → TPT turun lebih signifikan dari 5,64% menjadi 5,13% (-0,51%), mencerminkan adanya pemulihan ekonomi yang lebih kuat, dengan lebih banyak lapangan kerja yang tersedia.

- 2023 ke 2024 → TPT kembali turun ke 5,02% (-0,11%), tetapi laju penurunannya mulai melambat dibandingkan tahun sebelumnya.

Capaian menunjukkan sejauh mana realisasi mendekati atau melampaui target yang telah ditetapkan:

- 2021 ke 2022 → Capaian meningkat dari 99,66% menjadi 102% (+2,34%), menandakan keberhasilan awal dalam menekan pengangguran.
- 2022 ke 2023 → Capaian melonjak dari 102% menjadi 110,31% (+8,31%), menunjukkan bahwa strategi penciptaan lapangan kerja mulai memberikan dampak nyata.
- 2023 ke 2024 → Capaian meningkat sedikit menjadi 112% (+1,69%), namun kenaikan ini jauh lebih kecil dibandingkan lonjakan tahun sebelumnya.

Tingkat Pengangguran Terbuka terus menurun sejak 2021, tetapi laju penurunannya semakin melambat pada 2024. Capaian TPT terus meningkat, menandakan keberhasilan kebijakan ketenagakerjaan, tetapi ruang perbaikan semakin terbatas. Penyerapan tenaga kerja digital dan sektor informal berkontribusi terhadap tren positif ini, tetapi tantangan keterampilan tenaga kerja dan ketimpangan regional masih perlu diperhatikan.

III. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	TARGET 2026	REALISASI 2024
4	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,60%	5,02%

Realisasi tahun 2024 5,02% sudah lebih rendah dibandingkan target jangka menengah untuk 2026 (5,60%). Ini menandakan bahwa pencapaian dalam mengurangi tingkat pengangguran lebih cepat dari yang direncanakan.

Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2024 sebesar 5,02% sudah melampaui target 2026 (5,60%). Ini mencerminkan keberhasilan dalam penciptaan lapangan kerja dan serapan tenaga kerja yang lebih baik dari ekspektasi. Oleh karena itu, target TPT jangka menengah perlu direvisi menjadi lebih ambisius, serta perlu ada strategi untuk menjaga tren positif ini, terutama dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dan distribusi kesempatan kerja secara lebih merata.

IV. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Perbandingan TPT 5,02% dengan Standar Nasional 4,91%

Aspek	Realisasi (5,02%)	Standar Nasional (4,91%)	Perbandingan
Tingkat Pengangguran	5,02%	4,91%	Lebih tinggi 0,11%
Lapangan Kerja	Sedikit lebih terbatas	Sedikit lebih luas	Perlu evaluasi ketersediaan kerja
Daya Serap Tenaga Kerja	Kurang optimal	Lebih optimal	Perlu peningkatan peluang kerja
Peluang Ekonomi	Masih perlu penguatan	Sedikit lebih baik di nasional	Evaluasi faktor penyebab
Faktor Penyebab	Pertumbuhan ekonomi, pendidikan, keterampilan, investasi	Kondisi nasional lebih stabil	Perlu kebijakan strategis

Tingkat pengangguran di wilayah ini (5,02%) sedikit lebih tinggi dibandingkan standar nasional (4,91%). Meskipun selisihnya kecil (0,11%), tetap perlu strategi untuk menekan angka pengangguran agar lebih kompetitif dibandingkan rata-rata nasional.

Fokus utama untuk mengatasi pengangguran:

- Meningkatkan investasi di sektor industri dan jasa untuk membuka lebih banyak lapangan kerja.

- Meningkatkan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
- Mendorong kewirausahaan dan UMKM agar lebih banyak masyarakat menciptakan peluang kerja sendiri.
- Memperbaiki konektivitas tenaga kerja, misalnya dengan meningkatkan akses transportasi dan digitalisasi informasi kerja.

V. Analisis penyebab dari keberhasilan atau kegagalan serta peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka:

- ✓ Pemulihan ekonomi pasca pandemi melalui sektor-sektor ekonomi yang terdampak pandemi mulai bangkit kembali, sehingga menyerap lebih banyak tenaga kerja.
- ✓ Peningkatan investasi dan industri melalui masuknya investasi dalam sektor manufaktur, teknologi, dan jasa menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
- ✓ Dukungan terhadap UMKM, startup, dan industri kreatif membuka lebih banyak peluang kerja, terutama bagi anak muda dan pekerja informal.
- ✓ Peningkatan program pelatihan dan vokasi melalui program pemerintah dan swasta yang berfokus pada pelatihan keterampilan (vokasi) membuat tenaga kerja lebih siap dan sesuai dengan kebutuhan industri.
- ✓ Transformasi digital dan ekonomi gig (ekonomi berbasis platform digital) dimana kemajuan teknologi membuka peluang pekerjaan baru, baik di sektor formal maupun informal, seperti freelancer, e-commerce, dan jasa berbasis digital.

- ✓ Program padat karya dan infrastruktur melalui program pembangunan infrastruktur yang melibatkan banyak tenaga kerja memberikan kontribusi dalam menyerap angkatan kerja di berbagai daerah.

Alternatif Solusi untuk Menjaga dan Meningkatkan Penurunan Pengangguran antara lain :

- ✓ Meningkatkan pelatihan berbasis industri agar tenaga kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
- ✓ Meningkatkan investasi dalam industri padat karya dengan cara Pemerintah menarik lebih banyak investasi di sektor manufaktur, pariwisata, dan agribisnis yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
- ✓ Mempermudah akses permodalan dan pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat agar lebih banyak yang berani membuka usaha sendiri.
- ✓ Peningkatan pemerataan kesempatan kerja di daerah dengan cara membangun infrastruktur dan memperkuat sektor ekonomi lokal agar lebih banyak peluang kerja di luar kota-kota besar.
- ✓ Meningkatkan literasi digital dan memberikan pelatihan berbasis teknologi agar tenaga kerja bisa beradaptasi dengan perkembangan dunia kerja.
- ✓ Meningkatkan perlindungan pekerja informal dengan cara pemberian akses jaminan sosial, kesehatan, dan keuangan bagi pekerja di sektor informal agar lebih sejahtera dan stabil.
- ✓ Kolaborasi dengan sektor swasta untuk program magang dan kerja praktik dengan cara menyediakan lebih banyak kesempatan bagi lulusan baru agar memiliki pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja secara penuh.

VI. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan membuat perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran. Kriteria perbandingan yang digunakan dalam analisis efisiensi sebagai berikut:

- a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan atau sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasara
- b. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan atau sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran.

Tingkat Efisiensi =	$\frac{\text{Persentase Rata-Rata Capaian Sasaran}}{\text{Persentase Realisasi Anggaran}} \times 100\%$
----------------------------	---

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Sasaran	% capaian kinerja sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	1	112%	9.061.947.085,00	8.609.001.131,00	95%	118%	Efisien

VII. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

NO	SASARAN	PROGRAM
4	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

5. MENINGKATNYA KUALITAS SEKTOR PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

1) JUMLAH EVENT SENI DAN BUDAYA

I. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
5	Meningkatnya Kualitas Sektor Pariwisata dan Kebudayaan	Jumlah event seni dan budaya	6	6	100%

TABEL EVEN SENI DAN BUDAYA

NO.	NAMA EVENT	WAKTU PELAKSANAAN	LOKASI EVENT	PENYELENGGARA
1.	Festival Palangka	Maret	Gedung Olahseni Disparbudpora Kota Palangka Raya	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Palangka Raya
2.	Pagelaran Seni Budaya	Juni	Gedung Olahseni Disparbudpora Kota Palangka Raya	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Palangka Raya
		Agustus		
		Oktober		
3.	Festival Lewu Palangka Raya	Juli	Palangka Raya	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Palangka Raya
4.	Pemilihan Putra Putri Pariwisata	Juli	Palangka Raya	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Palangka Raya
5.	Senam Masal	September	Palangka Raya	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Palangka Raya
6.	Ritual Ma'mapas Lewu	Desember	Gedung Olahseni Disparbudpora Kota Palangka Raya	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Palangka Raya

Sumber Data: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Palangka Raya

Jika sebuah event seni dan budaya memiliki target **6 event** dan capaian **6 event**, maka secara kuantitatif, ketercapaian sudah mencapai **100%** dari target yang ditetapkan. Secara umum, ketercapaian target **6 dari 6 event** menunjukkan keberhasilan dari sisi jumlah. Hal ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja (sangat tinggi).

II. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021
5	Meningkatnya Kualitas Sektor Pariwisata dan Kebudayaan	Jumlah event seni dan budaya	6	100%	Berbeda IKU antara RPJMD 2018-2023 dengan RPD 2024-2026					

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya periode 2024-2026 Indikator Daerah jumlah Event Seni dan Budaya tidak memiliki perbandingan dengan tahun tahun sebelumnya, dikarenakan Indikator ini merupakan Indikator Daerah baru yang tidak terdapat pada RPJMD lalu.

Sebagai penanggung jawab indikator tersebut adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga dimana pada tahun 2021,2022 dan 2023 indikator yang ikut diampu Perangkat Daerah tersebut adalah sebagai berikut :

Indikator	Realisasi 2023	Capaian 2023	Realisasi 2022	Capaian 2022	Realisasi 2021	Capaian 2021
Harapan Lama Sekolah	14,99	135,05%	14,97	135%	9,87	89,24%
Rata-rata Lama Sekolah	11,65	98,31%	11,55	97,5%	11,53	97,71%
Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	1,49	36,88%	1,42	35%	7,18	176,85%

Pada RPJMD Kota Palangka Raya, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga mengampu indikator Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang bersanding dengan Dinas Pendidikan. Sedangkan untuk indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Paertanian bersanding dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Dinas Perikanan.

III. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	TARGET 2026	REALISASI 2024
5	Meningkatnya Kualitas Sektor Pariwisata dan Kebudayaan	Jumlah event seni dan budaya	8	6

Meskipun realisasi 2024 telah mencapai target, tantangan berikutnya adalah meningkatkan jumlah event di tahun-tahun mendatang, yaitu menjadi 8 event pada 2026. Artinya, perlu ada peningkatan jumlah event sebesar 1 event per tahun agar target jangka menengah dapat tercapai. Realisasi jumlah event seni dan budaya tahun 2024 telah sesuai dengan target, yaitu 6 event. Namun, untuk mencapai target jangka menengah (8 event pada 2026), perlu strategi yang lebih matang dalam pendanaan, inovasi, serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan pendekatan yang tepat, peningkatan jumlah event di tahun-tahun mendatang dapat dicapai dengan sukses dan memberikan dampak positif bagi sektor seni dan budaya.

IV. Analisis penyebab dari keberhasilan atau kegagalan serta peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Beberapa faktor yang kemungkinan berkontribusi terhadap pencapaian target event seni dan budaya antara lain:

- ✓ Dukungan pemerintah dan pemangku kepentingan melalui penyediaan anggaran, kebijakan, dan kolaborasi dengan komunitas seni serta sponsor swasta membantu terlaksananya event sesuai target.
- ✓ Meningkatnya kesadaran dan minat masyarakat terhadap seni dan budaya menjadi faktor pendorong keberhasilan event.
- ✓ Kesiapan infrastruktur dan fasilitas event yang strategis serta dukungan logistik dan teknologi turut mendukung kelancaran penyelenggaraan acara.
- ✓ Pemanfaatan media sosial, platform digital, serta media massa untuk bahan promosi event yang dilaksanakan.
- ✓ Terlaksananya sinergi antara pemerintah, seniman, komunitas lokal, dan pihak swasta memperkuat konsep serta eksekusi acara.
- ✓ Berbagai variasi event, seperti festival musik, pameran seni, pertunjukan tari, atau workshop budaya, membuat acara lebih menarik bagi berbagai kalangan.

Alternatif Solusi untuk Meningkatkan Dampak Event Seni dan Budaya antara lain :

- ✓ Fokus pada peningkatan konsep, inovasi, dan daya tarik acara agar memberikan pengalaman yang lebih bermakna bagi peserta dan penonton.
- ✓ Memberikan lebih banyak ruang bagi seniman dan pelaku budaya lokal untuk tampil dan berkembang dalam event tersebut.
- ✓ Mengajak lebih banyak pihak untuk mendukung acara, baik dalam bentuk dana, promosi, maupun fasilitas, agar lebih berkelanjutan.
- ✓ Menjadikan event sebagai bagian dari strategi pariwisata daerah dengan menarik wisatawan lokal maupun internasional.

- ✓ Menggunakan media sosial, platform streaming, dan teknologi digital untuk menjangkau lebih banyak audiens dan meningkatkan eksposur acara.
- ✓ Mencoba konsep baru seperti festival seni berbasis augmented reality (AR), pameran interaktif, atau pertunjukan budaya yang dikemas secara modern.
- ✓ Menjadikan event sebagai sarana edukasi mengenai budaya lokal, sejarah, dan nilai-nilai tradisional agar lebih bernilai bagi masyarakat.
- ✓ Memastikan event bukan hanya sekali dalam setahun, tetapi juga diikuti dengan program berkelanjutan seperti pelatihan seni, workshop, atau festival kecil yang mendukung pengembangan budaya sepanjang tahun.

V. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan membuat perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran. Kriteria perbandingan yang digunakan dalam analisis efisiensi sebagai berikut:

- a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan atau sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasara
- b. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan atau sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran.

Tingkat Efisiensi =	$\frac{\text{Persentase Rata-Rata Capaian Sasaran}}{\text{Persentase Realisasi Anggaran}} \times 100\%$
----------------------------	---

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Sasaran	% capaian kinerja sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Meningkatkan Kualitas Pariwisata	Meningkatnya kualitas sektor pariwisata dan kebudayaan	1	100%	34.913.994.071,00	34.476.693.648,00	99%	101%	Efisien

VI. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

NO	SASARAN	PROGRAM
5	Meningkatnya Kualitas Sektor Pariwisata dan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

6. TERWUJUDNYA PEMERATAAN INFRASTRUKTUR EKONOMI MAUPUN SOSIAL ANTAR KECAMATAN

1) INDEKS AKSESIBILITAS WILAYAH

I. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
6	Terwujudnya pemerataan infrastruktur ekonomi maupun sosial antar kecamatan	Indeks Aksesibilitas wilayah	0,315	0,32	102%

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan G. Obos XI Komplek Perkantoran Lingkar Dalam
Website : www.pupr.palangkaraya.go.id, e-mail : pupr@palangkaraya.go.id
Palangka Raya 73112

Perhitungan Indikator Indeks Aksesabilitas Wilayah

Formula = Panjang Jalan / Luas Wilayah
= 911,83 Km / 2.848,7 Km²
= 0,32

Pit. Kepala Dinas,

FAHRIAL ANCHAR, S.T
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19720826 200501 1 005

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya

Indeks Aksesibilitas Wilayah mengukur tingkat kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan dasar, infrastruktur, dan fasilitas pendukung seperti transportasi, komunikasi, serta akses ke pusat-pusat ekonomi dan sosial.

Indeks ini mencerminkan seberapa baik konektivitas dan penyediaan infrastruktur di suatu wilayah dalam mendukung mobilitas dan interaksi sosial-ekonomi.

Capaian Indeks Aksesibilitas Wilayah sebesar 0,32 yang sedikit melampaui target 0,315 menunjukkan kemajuan positif dalam peningkatan infrastruktur dan konektivitas.

Meskipun selisihnya relatif kecil (sekitar 1,59%), pencapaian ini mencerminkan efektivitas program dan investasi yang telah dilakukan. Untuk mencapai dampak yang lebih signifikan dan pemerataan akses di seluruh wilayah, direkomendasikan untuk melakukan evaluasi mendalam serta penyesuaian strategi pembangunan infrastruktur yang lebih terintegrasi dan partisipatif.

Analisis ini dapat dijadikan dasar bagi pembuat kebijakan untuk terus meningkatkan dan menyempurnakan program pengembangan infrastruktur, guna memastikan aksesibilitas wilayah yang optimal serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

II. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021
7	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	71,58	97%	Berbeda IKU antara RPJMD 2018-2023 dengan RPD 2024-2026					

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya periode 2024-2026 Indikator Daerah Indeks Aksesibilitas Wilayah tidak memiliki perbandingan dengan tahun tahun sebelumnya, dikarenakan Indikator ini merupakan Indikator Daerah baru yang tidak terdapat pada RPJMD lalu. Penanggung jawab indikator Indeks Aksesibilitas Wilayah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan serta Dinas Perhubungan dimana pada tahun 2021,2022,2023 indikator yang diampu adalah sebagai berikut :

Indikator	Realisasi 2023	Capaian 2023	Realisasi 2022	Capaian 2022	Realisasi 2021	Capaian 2021
Indeks Kualitas Infrastruktur ke P U an (IKPU)	66,75	102,69%	66,19	103,42%	64,46	102,32%

Indeks Kualitas Permukiman (IKPR)	78,95	110,21%	68,62	100,23%	67,18	102,88%
Persentase Kecamatan yang terlayani Transportasi Umum (TU)	80%	100%	60%	100%	60%	100%

Pada RPJMD Kota Palangka Raya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta Dinas Perhubungan mengampu Indikator IKPU, IKPR dan Persentase Kecamatan yang terlayani Transportasi Umum sehingga untuk perbandingan dengan tahun 2024 yang menggunakan dokumen RPD mengalami kendala.

III. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	TARGET 2026	REALISASI 2024
6	Terwujudnya pemerataan infrastruktur ekonomi maupun sosial antar kecamatan	Indeks Aksesibilitas wilayah	0,345	0,32

Dengan pencapaian 0,32 di tahun 2024, maka untuk mencapai target 0,345 di tahun 2026, perlu adanya upaya berkelanjutan dalam peningkatan akses infrastruktur, konektivitas transportasi, dan pembangunan wilayah terpencil.

Realisasi Indeks Aksesibilitas Wilayah tahun 2024 mencapai 0,32, sedikit melampaui target 0,315. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam infrastruktur dan konektivitas wilayah, tetapi peningkatannya masih perlu dipercepat untuk mencapai target 0,345 di tahun 2026.

Ke depan, pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi, meningkatkan konektivitas wilayah terpencil, serta

memperkuat investasi dan digitalisasi dalam pembangunan wilayah. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Indeks Aksesibilitas Wilayah dapat terus meningkat dan memberikan dampak positif bagi mobilitas, ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

IV. Analisis penyebab dari keberhasilan atau kegagalan serta peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap pencapaian target indeks aksesibilitas wilayah:

- ✓ Peningkatan pembangunan infrastruktur transportasi dengan adanya pembangunan atau perbaikan jalan, jembatan, dan sarana transportasi publik yang memudahkan mobilitas masyarakat.
- ✓ Penyediaan layanan transportasi yang lebih baik melalui bertambahnya akses terhadap angkutan umum, seperti bus, atau transportasi berbasis aplikasi, meningkatkan konektivitas antarwilayah.
- ✓ Aksesibilitas tidak hanya terkait fisik, tetapi juga digital. Meningkatnya jaringan internet dan telekomunikasi turut mendukung kemudahan akses informasi dan layanan.
- ✓ Dukungan kebijakan pemerintah daerah dan pusat melalui program pembangunan infrastruktur dan kebijakan transportasi yang mendukung konektivitas berperan dalam pencapaian target.
- ✓ Partisipasi sektor swasta dalam pengembangan infrastruktur melalui investasi dari pihak swasta dalam transportasi dan pembangunan wilayah turut membantu peningkatan aksesibilitas.
- ✓ Penggunaan sistem navigasi, aplikasi transportasi online, serta perbaikan manajemen lalu lintas berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi aksesibilitas.

Alternatif Solusi untuk Mempertahankan dan Meningkatkan Indeks

Aksesibilitas Wilayah antara lain :

- ✓ Fokus pada pembangunan jalan, jembatan, serta fasilitas transportasi di wilayah yang masih sulit dijangkau.
- ✓ Meningkatkan koordinasi antara transportasi darat, laut, dan udara untuk memastikan mobilitas yang lebih efisien.
- ✓ Peningkatan pemeliharaan infrastruktur dengan cara memastikan jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi lainnya mendapatkan perawatan rutin agar tetap layak digunakan.
- ✓ Mendorong investasi sektor swasta dalam transportasi dengan cara melibatkan pihak swasta untuk mendukung pengembangan infrastruktur transportasi melalui skema kemitraan publik-swasta (PPP).
- ✓ Pengembangan transportasi ramah lingkungan dengan cara mendorong penggunaan kendaraan listrik, transportasi berbasis energi terbarukan, serta konsep smart mobility untuk mengurangi dampak lingkungan.
- ✓ Meningkatkan akses digital untuk mendukung mobilitas masyarakat melalui perluasan jaringan internet dan sistem navigasi yang dapat membantu masyarakat dalam mengakses layanan transportasi.

V. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan membuat perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran. Kriteria perbandingan yang digunakan dalam analisis efisiensi sebagai berikut:

- a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan atau sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasara

- b. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan atau sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran.

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Persentase Rata-Rata Capaian Sasaran}}{\text{Persentase Realisasi Anggaran}} \times 100\%$$

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Sasaran	% capaian kinerja sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Menciptakan pemerataan pembagunan antar wilayah Kecamatan yang berkelanjutan	Terwujudnya pemerataan infrastruktur ekonomi maupun sosial antar kecamatan	1	102%	291.154.080.921,00	282.731.935.894,68	97%	105%	Efisien

VI. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

NO	SASARAN	PROGRAM
6	Terwujudnya Pemerataan Infrastruktur Ekonomi maupun Sosial antar Kecamatan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

NO	SASARAN	PROGRAM
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

7. TERJAGANYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

1) INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)

I. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
7	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	73,98	71,58	97%

Berdasarkan tabel perbandingan target dan realisasi kinerja IKU Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2024 yang ditargetkan dengan nilai 73,98 dan dengan realisasi target dengan nilai 71,58. Perolehan persentase capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup hanya mencapai 97% dimana item pendukung dalam pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terdiri dari Indeks Kualitas Air dengan nilai 49,17, untuk Indeks Kualitas Udara dengan nilai 89,41 dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dengan nilai 77,11. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Palangka Raya pada tahun 2024 mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang ada IKLH tahun 2024 mencapai angka 71,58 dengan kategori Baik. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan capaian tahun 2023 yang berada di angka 69,67. Walaupun berdasarkan target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah capaian IKLH hanya mencapai 97% saja belum sepenuhnya mencapai target yang diharapkan. Namun berdasarkan persentase capaian diatas 91%, ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja (sangat tinggi).

II. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021
7	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	71,58	97%	Berbeda IKU antara RPJMD 2018-2023 dengan RPD 2024-2026					

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya periode 2024-2026 Indikator Daerah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tidak memiliki perbandingan dengan tahun tahun sebelumnya, dikarenakan Indikator ini merupakan Indikator Daerah baru yang tidak terdapat pada RPJMD lalu. Pada tahun 2021,2022 dan 2023. Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dipisahkan menjadi beberapa indikator yaitu :

Indikator	Realisasi 2023	Capaian 2023	Realisasi 2022	Capaian 2022	Realisasi 2021	Capaian 2021
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	76,73	153,46%	77,07	154%	77,28	154,56%
Indeks Kualitas Air	46,92	67,03%	54	77%	50	71,43%
Indeks Kualitas Udara	86,97	115,96%	90,82	121%	90,53	120,71%

Indikator yang terdapat pada RPD merupakan rumusan keseluruhan dari indikator yang tertuang pada RPJMD sebelumnya.

III. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	TARGET 2026	REALISASI 2024
7	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	74,00	71,58

Dengan realisasi 71,58 pada tahun 2024, pencapaian ini masih jauh dari target tahun 2026 (74,00). Artinya, untuk mencapai target jangka menengah, perlu dilakukan upaya pemulihan dan peningkatan kualitas lingkungan yang lebih agresif.

Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2024 hanya mencapai 71,58, lebih rendah dari target 74,00 yang masih jauh dari target tahun 2026. Ini menunjukkan bahwa tantangan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan masih besar, dan perlu langkah-langkah strategis yang lebih agresif untuk memastikan pemulihan lingkungan agar target jangka menengah dapat tercapai.

IV. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Perbandingan IKLH 71,58 dengan Standar Nasional 72,54

Aspek	Realisasi (71,58)	Standar Nasional (72,54)	Perbandingan
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,58	72,54	Lebih rendah 0,96 poin
Kualitas Udara	Perlu perbaikan	Sedikit lebih baik	Bisa dipengaruhi oleh polusi industri atau transportasi
Kualitas Air	Berpotensi mengalami pencemaran	Sedikit lebih bersih	Perlu evaluasi sumber pencemaran air
Tutupan Lahan	Berkurang akibat deforestasi atau urbanisasi	Sedikit lebih baik	Perlu peningkatan penghijauan
Faktor Penyebab	Polusi, deforestasi, tata kelola lingkungan	Nasional lebih stabil	Butuh strategi peningkatan lingkungan

Beberapa strategi untuk meningkatkan kualitas lingkungan:

- Meningkatkan penghijauan dan ruang terbuka hijau untuk meningkatkan kualitas udara dan resapan air.
- Mengurangi emisi kendaraan dan industri dengan regulasi ketat terhadap polusi udara.
- Meningkatkan pengelolaan limbah dan sampah agar tidak mencemari air dan tanah.

- Memastikan kualitas air tetap terjaga dengan pengendalian pencemaran sungai dan danau.
- Memperketat kebijakan tata ruang agar pembangunan tidak merusak lingkungan.

V. Analisis penyebab dari keberhasilan atau kegagalan serta peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Beberapa faktor yang kemungkinan berkontribusi terhadap tidak tercapainya target IKLH:

- ✓ Emisi dari kendaraan bermotor dan pembakaran sampah bisa menjadi penyebab menurunnya kualitas udara.
- ✓ Alih fungsi lahan, perambahan hutan, dan urbanisasi yang tidak terkendali menyebabkan berkurangnya daya dukung lingkungan.
- ✓ Limbah industri, rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari sungai, danau, serta air tanah.
- ✓ Cuaca ekstrem seperti banjir, kekeringan, dan kenaikan suhu berkontribusi terhadap penurunan kualitas lingkungan.
- ✓ Rendahnya tingkat kepedulian terhadap lingkungan, seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan dan kurangnya inisiatif penghijauan.
- ✓ Kapasitas dan kebijakan pengelolaan lingkungan yang belum maksimal yaitu adanya beberapa program lingkungan mungkin belum berjalan secara optimal atau belum memiliki dampak yang signifikan.

Alternatif Solusi untuk Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

- ✓ Mengembangkan transportasi ramah lingkungan, memperketat regulasi emisi industri, serta meningkatkan ruang terbuka hijau.
- ✓ Mengurangi deforestasi dan memperbanyak program penghijauan,

baik di perkotaan maupun di daerah yang terdampak degradasi lahan.

- ✓ Mendorong program daur ulang, pengurangan penggunaan plastik, serta sistem pengolahan sampah yang lebih efektif.
- ✓ Memastikan kualitas air tetap terjaga melalui pengendalian limbah industri, pembangunan sistem sanitasi yang lebih baik, serta konservasi daerah resapan air.
- ✓ Mengawasi dan menindak tegas pelanggaran terhadap regulasi lingkungan, termasuk industri yang mencemari lingkungan.
- ✓ Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan melalui kampanye edukasi dan insentif bagi masyarakat yang aktif dalam kegiatan ramah lingkungan, seperti program bank sampah dan penghijauan.
- ✓ Memanfaatkan teknologi untuk memantau kualitas udara dan air, serta mengembangkan solusi berbasis digital untuk pengelolaan lingkungan yang lebih baik.
- ✓ Mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dengan mengembangkan energi surya, angin, dan bioenergi.
- ✓ Membangun kerja sama yang lebih kuat dalam program perlindungan lingkungan agar lebih berkelanjutan.

VI. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan membuat perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran. Kriteria perbandingan yang digunakan dalam analisis efisiensi sebagai berikut:

- a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan atau sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasara

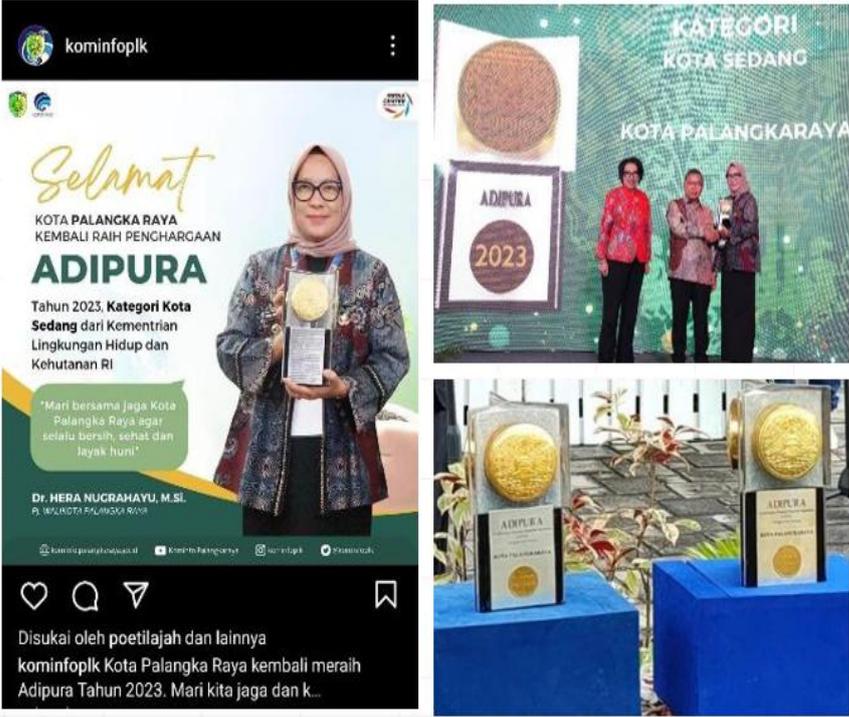
- b. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan atau sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran.

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Persentase Rata-Rata Capaian Sasaran}}{\text{Persentase Realisasi Anggaran}} \times 100\%$$

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Sasaran	% capaian kinerja sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Menciptakan pemerataan pembagunan antar wilayah Kecamatan yang berkelanjutan	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	1	97%	76.089.139.921,00	74.390.476.847,22	98%	99%	Tidak Efisien

Walaupun kualitas lingkungan hidup dalam efisiensi penggunaan sumber daya memperoleh kriteria tidak efisien, namun Kota Palangka Raya telah berupaya dalam perbaikan melalui beberapa capaian antara lain:

4) Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Dalam Daerah Kabupaten/Kota



Pemerintah Kota Palangka Raya Kembali menerima Penghargaan Anugerah Adipura Tahun 2023 untuk Kategori Kota Sedang Tanggal 5 Maret 2024, diserahkan oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta

4) Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Dalam Daerah Kabupaten/Kota

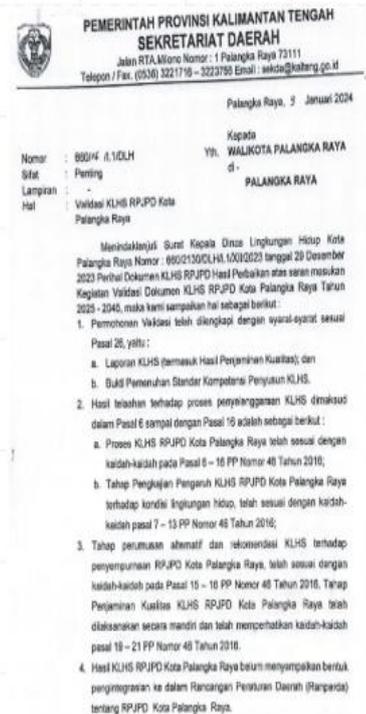


Pada Tanggal 29 Mei 2024, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, Alue Dohong, PhD meresmikan Pusat Daur Ulang atau PDU sampah di Jalan Wortel Kota Palangka Raya. PDU ini merupakan bantuan KLHK dengan kapasitas 10 ton/hari. Produk olahan dari PDU sampah antara lain kompos, pakan ikan/pakan ayam dari magot, paving blok dari sampah.



Pelaksanaan Kick Off Penyusunan Dokumen KLHS RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2025-2029 pada tanggal 6 Agustus 2024

Pada Tahun 2024, telah disampaikan hasil Validasi KLHS RPJPD Kota Palangka Raya dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, melalui Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 660/36/I,1/DLH Tanggal 9 Januari 2024. Dan seluruh Rekomendasi hasil Penjaminan Kualitas atas KLHS Kota Palangka Raya telah ditindaklanjuti.



VII. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

NO	SASARAN	PROGRAM
7	Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

NO	SASARAN	PROGRAM
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

8. MENINGKATNYA PEREKONOMIAN SEKTOR STRATEGIS

1) SKOR POLA PANGAN HARAPAN

I. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
8	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis	Skor Pola Pangan Harapan	91,6	87,7	96%



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
 Jl. G. Obor XI Komplek Perkantoran Pemko No. 2 Jekan Raya, Palangka Raya Kalimantan Tengah 73112
 Telepon (0536) 3231967 Faksimile (0536) 3231967
 Laman palangkaraya.go.id Pos-el dkpp@palangkaraya.go.id

Skor PPH Konsumsi Kota Palangka Raya Tahun 2024 menggunakan data sekunder yang diperoleh dari data Susenas 2024 berdasarkan rata-rata konsumsi perkapita seminggu menurut komoditi makanan dan golongan pengeluaran. Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) menggunakan Aplikasi Harmonisasi Analisis Pola Pangan Harapan Berdasarkan Data Susenas Kerjasama Badan Pangan Nasional dengan Universitas Institut Pertanian Bogor. Secara detail hasil perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Palangka Raya sebagai berikut :

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram/Kapita/Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)					Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
			Kkal/Kap	%	% AKE *)	Bobot					
1.	Padi-Padian	244,5	986	52,1	46,9	0,5	26,0	23,5	25,0	23,5	
2.	Umbi-Umbian	32,6	37	2,0	1,8	0,5	1,0	0,9	2,52	0,9	
3.	Pangan Hewani	171,3	336	17,7	16,0	2,0	35,5	32,0	24,0	24,0	
4.	Minyak dan lemak	27,4	247	13,0	11,7	0,5	6,5	5,9	5,9	5,0	
5.	Buah/Biji Berminyak	1,1	6	0,3	0,3	0,5	0,2	0,2	1,0	0,2	
6.	Kacang-Kacangan	22,6	60	3,1	2,8	2,0	6,3	5,7	10,0	5,7	
7.	Gula	16,4	63	3,3	3,0	0,5	1,7	1,5	2,5	1,5	
8.	Sayur dan Buah	225,0	113	6,0	5,4	5,0	30,0	27,0	30,0	27,0	
9.	Lain-lain	100,2	45	2,4	2,2	-	-	-	-	-	
	Total		1.893	100,0	90,1		107,1	96,5	100,0	87,7	

Keterangan : *) Angka Kecukupan Energi 2,100 Kkal/Kapita/Hari
 **) Angka Kecukupan Protein 57,0 Gram/Kapita/Hari

An. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
 Kepala Bidang Ketahanan Pangan



Y. STANTO, S.P.
 Pembina (IV/a)
 19720115 199803 1 003

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya
 Meskipun realisasi skor pola pangan harapan sebesar 87,7 cukup mendekati target 91,6 terdapat gap sekitar 3,9 poin atau 4,26% yang menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan. Upaya peningkatan akses pangan bergizi, edukasi gizi, serta intervensi kebijakan yang tepat sasaran diperlukan agar pola konsumsi pangan

masyarakat dapat lebih optimal sesuai dengan standar yang diharapkan. Langkah-langkah tersebut akan berkontribusi pada peningkatan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dari realisasi diatas tersebut capaian Skor Pola Pangan Harapan mencapai 96%. Hal ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja (sangat tinggi).

II. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021
8	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis	Skor Pola Pangan Harapan	87,7	96%	Berbeda IKU antara RPJMD 2018-2023 dengan RPD 2024-2026					

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya periode 2024-2026 Indikator Daerah jumlah Skor Pola Pangan Harapan tidak memiliki perbandingan dengan tahun tahun sebelumnya, dikarenakan Indikator ini merupakan Indikator Daerah baru yang tidak terdapat pada RPJMD lalu. Indikator Skor Pola Pangan Harapan yang diampu oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan dan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian yang mana pada tahun 2021,2022 dan 2023 indikator yang diampu sebagai berikut:

Indikator	Realisasi 2023	Capaian 2023	Realisasi 2022	Capaian 2022	Realisasi 2021	Capaian 2021
Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	1,49	36,88%	1,42	35%	7,18	176,85%
Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan	6,48	74,57%	7,35	83%	4,10	45,61%
Pertumbuhan PDRB sektor Industri	3,79	59,13%	-2,81	-44%	0,69	11,20%

Pada RPJMD Kota Palangka Raya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan dan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian mengampu Indikator Pertumbuhan PDRB sektor

Pertanian, Perdagangan dan Industri sehingga untuk perbandingan dengan tahun 2024 yang menggunakan dokumen RPD mengalami kendala.

III. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	TARGET 2026	REALISASI 2024
8	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis	Skor Pola Pangan Harapan	98,4	87,7

Dengan realisasi 87,7 pada tahun 2024, maka masih ada kesenjangan yang cukup besar untuk mencapai target jangka menengah. Dibutuhkan peningkatan 10,7 poin untuk mencapai target tahun 2026, yang memerlukan upaya besar dalam perbaikan pola konsumsi pangan masyarakat.

Realisasi Skor Pola Pangan Harapan tahun 2024 sebesar 87,7 lebih rendah dari target 91,6, serta masih jauh dari target jangka menengah tahun 2026 (98,4). Ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan pola pangan masyarakat masih perlu ditingkatkan, terutama dalam meningkatkan konsumsi pangan yang lebih beragam dan bergizi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif dalam edukasi gizi, akses pangan bergizi, serta penguatan produksi pangan lokal agar target dapat tercapai.

IV. Analisis penyebab dari keberhasilan atau kegagalan serta peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Beberapa faktor yang kemungkinan berkontribusi terhadap tidak tercapainya target skor PPH:

- ✓ Masyarakat masih cenderung mengandalkan beras sebagai sumber utama pangan, sementara konsumsi protein hewani, sayur, dan buah masih rendah.
- ✓ Distribusi pangan yang tidak merata menyebabkan beberapa daerah sulit mendapatkan sumber protein, lemak sehat, dan serat yang cukup.
- ✓ Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pola makan seimbang dan keberagaman pangan dapat menghambat pencapaian skor PPH yang optimal.
- ✓ Protein hewani, sayur, dan buah sering kali memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan karbohidrat, sehingga masyarakat cenderung memilih pangan yang lebih murah tetapi kurang bergizi.
- ✓ Produksi pangan lokal masih lebih fokus pada komoditas tertentu, seperti padi, daripada mendorong diversifikasi sumber pangan.
- ✓ Sosialisasi tentang pentingnya konsumsi pangan yang beragam masih perlu diperkuat agar masyarakat lebih memahami manfaat pola makan sehat.
- ✓ Preferensi masyarakat terhadap makanan tertentu, terutama makanan instan dan cepat saji, bisa menghambat diversifikasi pangan yang lebih sehat.

Alternatif Solusi untuk Meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan antara lain :

- ✓ Mengurangi ketergantungan pada beras dan mendorong konsumsi sumber karbohidrat lain seperti ubi, jagung, sagu, serta meningkatkan konsumsi protein nabati dan hewani.
- ✓ Mendorong petani dan peternak untuk memproduksi lebih banyak variasi pangan bergizi, termasuk sayuran, buah-buahan, ikan, dan produk nabati.

- ✓ Memastikan pangan bergizi lebih mudah diakses oleh masyarakat melalui sistem logistik dan pasar yang lebih baik.
- ✓ Menggalakkan program edukasi tentang pentingnya konsumsi pangan yang beragam melalui sekolah, media sosial, dan komunitas.
- ✓ Mengendalikan harga pangan sehat seperti daging, telur, ikan, sayur, dan buah agar lebih terjangkau bagi masyarakat.
- ✓ Menggunakan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi distribusi bahan pangan.
- ✓ Mendorong usaha kecil dan menengah untuk memproduksi makanan sehat berbasis bahan lokal yang mudah dijangkau masyarakat.
- ✓ Menghubungkan kebijakan pertanian dan pangan dengan program kesehatan nasional untuk memastikan konsumsi gizi yang lebih baik.

V. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan membuat perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran. Kriteria perbandingan yang digunakan dalam analisis efisiensi sebagai berikut:

- a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan atau sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran
- b. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan atau sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran.

	Persentase Rata-Rata Capaian Sasaran
Tingkat Efisiensi =	$\frac{\text{Persentase Rata-Rata Capaian Sasaran}}{\text{Persentase Realisasi Anggaran}} \times 100\%$
	Persentase Realisasi Anggaran

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Sasaran	% capaian kinerja sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Meningkatkan Perekonomian Daerah	Meningkatnya perekonomian sektor strategis	1	96%	52.722.168.439,00	48.972.403.752,89	93%	103%	Efisien

VI. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

NO	SASARAN	PROGRAM
8	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		

9. MENINGKATNYA INVESTASI DAERAH

1) SKOR POLA PANGAN HARAPAN

I. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
9	Meningkatnya Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Investasi PMDN	5,41%	74,13%	1.370%

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar		
q.	PENANAMAN MODAL	2.q.1 Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	$\frac{A}{B} \times 100\% = \dots\%$ $\frac{337.221.412.863}{454.983.350.000} \times 100\% = 74,13\%$ <p>A = (Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota = Rp. 792.204.762.863 – Rp. 454.983.350.000 = Rp. 337.221.412.863 B = Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota = Rp. 454.983.350.000</p> <p>Catatan : 1. Jumlah Investasi tahun n = Rp. 792.204.762.863 2. Jumlah Investasi tahun n-1 = Rp. 454.983.350.000</p>

Palangka Raya, 17 Februari 2025
PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALANGKA RAYA,

S.T., M.P.W.K.
(III/d)
NIP.198108082010011011

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya
Target peningkatan investasi **5,41%** berhasil dilampaui dengan capaian **74,13%**, atau **1370,06% dari target**. Keberhasilan ini bisa disebabkan oleh kebijakan investasi yang baik, kondisi ekonomi yang mendukung, serta meningkatnya minat investor. Dampaknya sangat positif terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penerimaan pajak, tetapi perlu diimbangi dengan strategi keberlanjutan agar investasi tidak hanya bersifat sementara hal ini dapat dilakukan dengan beberapa Langkah antara lain:

a. Menjaga Stabilitas Kebijakan Investasi

Hindari perubahan kebijakan yang tiba-tiba agar investor tetap percaya diri.

b. Diversifikasi Sektor Investasi

Pastikan investasi tidak hanya terkonsentrasi di satu sektor saja, tetapi juga tersebar di berbagai sektor strategis.

c. Meningkatkan Kapasitas SDM dan Infrastruktur

Peningkatan investasi harus dibarengi dengan kesiapan tenaga kerja dan infrastruktur agar investasi tetap produktif.

Dari capaian tersebut menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja (sangat tinggi).

II. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021
9	Meningkatnya Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Investasi PMDN	74,13 %	1.370 %	Berbeda IKU antara RPJMD 2018-2023 dengan RPD 2024-2026					

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya periode 2024-2026 Indikator Daerah jumlah Persentase Peningkatan Investasi PMDN tidak memiliki perbandingan dengan tahun tahun sebelumnya, dikarenakan Indikator ini merupakan Indikator Daerah baru yang tidak terdapat pada RPJMD lalu. Indikator Persentase Peningkatan Investasi PMDN yang diampu oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu di tahun 2021,2022 dan 2023 berbeda indikator dengan RPD dimana indikatornya sebagai berikut :

Indikator	Realisasi 2023	Capaian 2023	Realisasi 2022	Capaian 2022	Realisasi 2021	Capaian 2021
Nilai Investasi	454,9 M	129,97%	344,76 M	116,87%	237,27 M	93,05%

Pada dokumen RPJMD yang menjadi indikator nya yakni berupa nilai investasi yang dicapai sedangkan untuk dokumen RPD berubah menjadi persentase peningkatan investasi yang dicapai.

III. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	TARGET 2026	REALISASI 2024
9	Meningkatnya Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Investasi PMDN	4,88%	74,13%

Realisasi tahun 2024 sudah jauh melampaui target jangka menengah tahun 2026. Dengan realisasi sebesar 74,13%, pencapaian ini menunjukkan tren investasi domestik yang sangat kuat. Bahkan, angka ini lebih dari 10 kali lipat target yang ditetapkan untuk 2024, 2025, dan 2026.

Realisasi persentase peningkatan investasi PMDN tahun 2024 sebesar 74,13% jauh melampaui target 2024 (5,41%) serta target 2026 (4,88%). Lonjakan ini menandakan keberhasilan kebijakan investasi dalam menarik modal domestik. Namun, diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ini, serta strategi untuk menjaga stabilitas dan distribusi investasi yang lebih merata di tahun-tahun mendatang.

IV. Analisis penyebab dari keberhasilan atau kegagalan serta peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Ada beberapa faktor utama yang mungkin berkontribusi terhadap keberhasilan peningkatan investasi PMDN:

- ✓ Deregulasi, pemberian insentif fiskal, dan kemudahan perizinan bisa menjadi faktor utama dalam menarik investor domestik.

- ✓ Pembangunan jalan, pelabuhan, kawasan industri, dan pusat logistik yang lebih baik membuat investor lebih tertarik untuk menanamkan modalnya.
- ✓ Digitalisasi dan penyederhanaan prosedur investasi melalui implementasi sistem perizinan online (seperti OSS - Online Single Submission) memudahkan investor dalam mengurus legalitas usaha mereka.
- ✓ Sektor manufaktur, teknologi, kesehatan, dan energi terbarukan mungkin mengalami peningkatan yang signifikan, menarik lebih banyak investasi domestik.
- ✓ Kepercayaan investor meningkat ketika perekonomian stabil dan regulasi investasi jelas serta mendukung pertumbuhan bisnis.
- ✓ Dukungan insentif pajak dan kemudahan berusaha dengan cara adanya pemotongan pajak, kredit usaha, dan insentif lainnya bagi investor dalam negeri dapat mempercepat pertumbuhan investasi.
- ✓ Inisiatif dari pemerintah daerah dalam menawarkan peluang investasi lokal juga bisa menjadi faktor utama keberhasilan.

Alternatif Solusi untuk Mempertahankan dan Meningkatkan Investasi PMDN antara lain :

- ✓ Pemerataan investasi ke daerah tertinggal dengan cara memberikan insentif lebih besar bagi investor yang berinvestasi di luar kota besar atau wilayah yang belum berkembang.
- ✓ Peningkatan kualitas tenaga kerja dengan cara mendorong program pelatihan vokasi, sertifikasi keterampilan, dan kerja sama industri dengan lembaga pendidikan.
- ✓ Memperkuat ekosistem usaha lokal dengan cara mendorong UKM dan industri kecil untuk berintegrasi dengan rantai pasok investasi besar.

- ✓ Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam promosi investasi melalui peningkatkan peran daerah dalam menawarkan potensi investasi melalui forum bisnis, pameran investasi, dan kemitraan strategis.
- ✓ Penyederhanaan regulasi lebih lanjut dengan cara memastikan regulasi investasi semakin fleksibel dan tidak membebani investor domestik dengan birokrasi yang rumit.
- ✓ Mendorong inovasi dan digitalisasi dalam dunia usaha melalui pemberian dukungan bagi industri berbasis digital untuk menarik lebih banyak investor lokal.
- ✓ Memastikan stabilitas ekonomi dan politik dengan cara menjaga kebijakan ekonomi tetap stabil agar investor domestik terus memiliki kepercayaan dalam menanamkan modalnya.

V. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan membuat perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran. Kriteria perbandingan yang digunakan dalam analisis efisiensi sebagai berikut:

- a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan atau sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasara
- b. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan atau sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran.

Tingkat Efisiensi =	$\frac{\text{Persentase Rata-Rata Capaian Sasaran}}{\text{Persentase Realisasi Anggaran}} \times 100\%$
----------------------------	---

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Sasaran	% capaian kinerja sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Meningkatkan Perekonomian Daerah	Meningkatnya investasi daerah	1	1.370%	14.029.084.279,00	13.371.004.651,00	95%	1442%	Efisien

VI. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

NO	SASARAN	PROGRAM
9	Meningkatnya Investasi Daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

10. MENINGKATNYA KETERTIBAN DAN KEAMANAN DI KALANGAN MASYARAKAT

1) PERSENTASE PENEGAKAN PERATURAN DAERAH (PPPD)

I. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
10	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan di Kalangan Masyarakat	Persentase Penegakan Peraturan Daerah (PPPD)	100%	100%	100%

Persentase Penegakan Peraturan Daerah mengukur sejauh mana peraturan daerah yang telah ditetapkan dijalankan secara konsisten dan efektif di lapangan.

Indikator ini mencerminkan komitmen aparat penegak hukum serta lembaga terkait dalam memastikan bahwa regulasi yang telah disahkan dapat diterapkan tanpa celah, guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang tertib dan akuntabel.

Pencapaian 100% dalam penegakan peraturan daerah merupakan hasil positif yang menunjukkan efektivitas sistem pengawasan, komitmen lintas lembaga, dan dukungan masyarakat dalam menjalankan regulasi yang telah ditetapkan.

Keberhasilan ini menciptakan landasan yang kuat untuk tata kelola pemerintahan yang tertib dan kepastian hukum yang tinggi, serta membuka peluang untuk mengimplementasikan kebijakan publik yang lebih efektif di masa depan.

Untuk menjaga dan meningkatkan pencapaian ini, diperlukan upaya berkelanjutan dalam pemantauan, evaluasi, dan peningkatan kualitas implementasi peraturan, agar kondisi ini tetap optimal dan adaptif terhadap perubahan lingkungan sosial-ekonomi.

II. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021
10	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan di Kalangan Masyarakat	Persentase Penegakan Peraturan Daerah (PPPD)	100%	100%	Berbeda IKU antara RPJMD 2018-2023 dengan RPD 2024-2026					

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya periode 2024-2026 Indikator Daerah Persentase Penegakan Peraturan Daerah (PPPD) tidak memiliki perbandingan dengan tahun tahun sebelumnya, dikarenakan Indikator ini merupakan Indikator Daerah baru yang tidak terdapat pada RPJMD lalu. Indikator Persentase Penegakan Peraturan Daerah (PPPD) yang diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2021,2022 dan 2023 berbeda dengan indikator yang ada, dimana indikator dokumen RPJMD adalah:

Indikator	Realisasi 2023	Capaian 2023	Realisasi 2022	Capaian 2022	Realisasi 2021	Capaian 2021
Angka Kriminalitas	100% Indikator K3	100%	1,39	402%	1,54	373%

Alasan utama terjadinya perubahan indikator menjadi PPPD dikarenakan angka kriminalitas merupakan penilaian yang melibatkan lintas sektoral (Aparat Penegak Hukum) dimana untuk perhitungannya pun berbeda. Sehingga untuk perbandingan kedua indikator tersebut mengalami kendala.

III. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	TARGET 2026	REALISASI 2024
10	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan di Kalangan Masyarakat	Persentase Penegakan Peraturan Daerah (PPPD)	100%	100%

Karena target untuk tahun 2026 juga sebesar 100%, maka pencapaian 2024 menjadi tolok ukur penting untuk menjaga konsistensi dalam penegakan Perda di tahun-tahun mendatang.

Realisasi 100% penegakan Perda pada 2024 sesuai dengan target yang ditetapkan, dan target untuk tahun 2026 juga berada di angka yang sama. Tantangan utama ke depan adalah menjaga konsistensi, efektivitas, dan kualitas penegakan Perda agar tetap relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Evaluasi berkala, transparansi, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan akan menjadi kunci untuk mempertahankan keberhasilan ini dalam jangka panjang.

IV. Analisis penyebab dari keberhasilan atau kegagalan serta peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Ada beberapa faktor utama yang mungkin berkontribusi terhadap keberhasilan Persentase Penegakan Peraturan Daerah (PPPD) antara lain:

- ✓ Pemerintah daerah kemungkinan memiliki strategi yang efektif dalam memastikan Perda ditegakkan sepenuhnya.
- ✓ Sinergi antara pemerintah daerah, Satpol PP, aparat penegak hukum, dan pihak terkait lainnya sangat penting dalam memastikan Perda diterapkan secara konsisten.
- ✓ Kampanye dan edukasi tentang Perda kepada masyarakat bisa meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
- ✓ Mekanisme monitoring dan evaluasi yang baik dapat memastikan tidak ada Perda yang diabaikan atau tidak dilaksanakan.
- ✓ Pemberian sanksi kepada pelanggar Perda bisa menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan aturan.

- ✓ Penggunaan teknologi seperti aplikasi pengaduan masyarakat dan sistem pelaporan berbasis online bisa membantu meningkatkan efektivitas pengawasan.

Alternatif Solusi untuk Meningkatkan Efektivitas Penegakan Perda antara lain:

- ✓ Melakukan evaluasi terhadap efektivitas Perda yang sudah ada dan memperbarui regulasi agar lebih relevan dengan perkembangan zaman.
- ✓ Mengembangkan mekanisme pengaduan online dan keterbukaan informasi agar masyarakat bisa lebih aktif dalam mengawasi pelaksanaan Perda.
- ✓ Penguatan kapasitas Satpol PP dan aparat penegak Perda lainnya melalui pemberian pelatihan berkala dan meningkatkan fasilitas operasional agar penegakan Perda bisa lebih profesional dan efisien.
- ✓ Mendorong pendekatan persuasif dan edukatif dalam penegakan Perda.
- ✓ Integrasi teknologi dalam pengawasan dan penegakan Perda melalui pemanfaatan sistem pemantauan berbasis teknologi seperti CCTV, sistem pelaporan online, dan data analitik untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.
- ✓ Mengadakan kajian dan evaluasi secara berkala untuk melihat apakah Perda masih efektif atau perlu revisi.

V. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan membuat perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran. Kriteria perbandingan yang digunakan dalam analisis efisiensi sebagai berikut:

- a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan atau sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasara
- b. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan atau sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran.

Tingkat Efisiensi =	$\frac{\text{Persentase Rata-Rata Capaian Sasaran}}{\text{Persentase Realisasi Anggaran}} \times 100\%$
----------------------------	---

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Sasaran	% capaian kinerja sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Meningkatnya Kerukunan dan Ketertiban di Kalangan Masyarakat	Meningkatnya ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat	2	62,45%	57.179.457.660,00	56.248.215.549,00	98%	64%	Tidak Efisien

Pada sasaran strategi meningkatnya ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat terdapat 2 Indikator Daerah dan salah satunya adalah Persentase Penegakan Peraturan Daerah (PPPD) yang dimana capaian kerjanya telah mencapai 100% (efisien), namun dikarenakan sasaran tersebut memiliki 2 indikator dan salah satu indikatornya tidak realistis dan achievable sehingga mempengaruhi tingkat efisiensi per sasaran tersebut.

VI. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

NO	SASARAN	PROGRAM
10	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan di Kalangan Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

2) INDEKS TOLERANSI (IT)

I. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
10	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan di Kalangan Masyarakat	Indeks Toleransi (IT)	13%	Urutan ke 33 dengan nilai 5,170	39%

Indeks Toleransi adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat toleransi masyarakat terhadap perbedaan, baik itu perbedaan agama, suku, ras, etnis, maupun lainnya. Indeks ini biasanya diukur melalui survei atau penelitian yang melibatkan responden dari berbagai latar belakang.

Indeks Toleransi dapat mencakup beberapa aspek, seperti:

1. Toleransi terhadap agama lain
2. Toleransi terhadap suku atau etnis lain
3. Toleransi terhadap perbedaan pendapat atau ideologi
4. Toleransi terhadap perbedaan jenis kelamin atau orientasi seksual

Indeks Toleransi dapat digunakan sebagai alat untuk:

1. Mengukur tingkat toleransi masyarakat
2. Mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan
3. Membuat kebijakan yang lebih inklusif dan toleran

Contoh indeks toleransi yang digunakan di Indonesia adalah Indeks Toleransi Sosial (ITS) yang dikembangkan oleh Setara Institute.

Untuk target yang ingin dicapai pada Tahun 2024 yaitu peringkat 13 Nasional, namun untuk tahun 2024 ini penilaian tersebut masih belum terbit hingga laporan ini disusun, sehingga menggunakan peringkat pada tahun 2023 yaitu peringkat ke 33 Nasional. Dimana terdapat gap sebesar 20 peringkat yang menyebabkan belum tercapainya target yang diharapkan dan hal ini membuat capaian realisasi turun drastis hanya sebesar 39%.

II. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021
10	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan di Kalangan Masyarakat	Indeks Toleransi (IT)	Urutan 33 dengan nilai 5,170	39%	Berbeda IKU antara RPJMD 2018-2023 dengan RPD 2024-2026					

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya periode 2024-2026 Indikator Daerah Persentase Penegakan Peraturan Daerah (PPPD) tidak memiliki perbandingan dengan tahun tahun sebelumnya, dikarenakan Indikator ini merupakan Indikator Daerah baru yang tidak terdapat pada RPJMD lalu. Indikator Indeks Toleransi (IT) yang diampu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2021,2022 dan 2023 berbeda dengan indikator yang ada, dimana indikator dokumen RPJMD adalah:

Indikator	Realisasi 2023	Capaian 2023	Realisasi 2022	Capaian 2022	Realisasi 2021	Capaian 2021
-----------	----------------	--------------	----------------	--------------	----------------	--------------

Angka Konflik	Peringkat 33	-20%	17	107%	6	250%
---------------	-----------------	------	----	------	---	------

Alasan utama terjadinya perubahan indikator menjadi Indeks Toleransi (IT) dikarenakan indikator Angka Konflik dinilai kurang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kota Palangka Raya sehingga untuk menindaklanjuti hal tersebut dilakukan penyesuaian indikator kinerja menjadi Indeks Toleransi (TI) yang di keluarkan oleh SETARA Institut.

III. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	TARGET 2026	REALISASI 2024
10	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan di Kalangan Masyarakat	Indeks Toleransi (IT)	10%	Urutan 33 dengan nilai 5,170

Dengan selisih 20 peringkat dari target tahun 2024, maka tantangan untuk mencapai target tahun 2026 (peringkat ke-10) menjadi semakin berat. Diperlukan upaya yang signifikan untuk memperbaiki kondisi toleransi agar mampu bersaing dengan daerah lain yang memiliki indeks toleransi lebih tinggi.

Capaian Indeks Toleransi tahun 2024 berada di peringkat ke-33, jauh dari target yang ditetapkan di peringkat ke-13. Dengan selisih 20 peringkat dari target tahun ini, tantangan untuk mencapai target peringkat ke-10 di tahun 2026 menjadi semakin besar.

Diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengurangi polarisasi sosial, meningkatkan interaksi antar kelompok, memperkuat regulasi terhadap intoleransi, serta membangun pendidikan toleransi sejak dini. Jika strategi-strategi ini diterapkan dengan efektif, maka peningkatan indeks toleransi dalam beberapa tahun ke depan dapat lebih optimal dan mencapai target yang telah ditetapkan.

IV. Analisis penyebab dari keberhasilan atau kegagalan serta peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Ada beberapa faktor yang mungkin jadi penyebab Kegagalan tercapainya indeks toleransi di Kota Palangka Raya antara lain:

- ✓ Ketegangan sosial yang dipicu oleh isu politik, agama, atau identitas dapat menyebabkan menurunnya tingkat toleransi di masyarakat.
- ✓ Program yang mengedepankan inklusivitas dan keberagaman mungkin masih kurang optimal atau belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
- ✓ Beberapa kelompok masyarakat mungkin masih menghadapi diskriminasi, baik dalam hal keagamaan, etnis, maupun budaya.
- ✓ Maraknya penyebaran informasi yang bersifat provokatif dan hoaks dapat memperkeruh hubungan antar kelompok dan memicu ketegangan sosial.
- ✓ Kurangnya interaksi sosial yang sehat antara kelompok yang berbeda dapat menyebabkan kesalahpahaman dan memperkuat prasangka negatif.
- ✓ Jika tidak ada kebijakan yang kuat dalam mempromosikan toleransi, maka sulit bagi masyarakat untuk berkembang dalam lingkungan yang inklusif.
- ✓ Tidak semua masyarakat memahami pentingnya toleransi dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan pendidikan dan tempat kerja.

Alternatif Solusi untuk Meningkatkan Indeks Toleransi antara lain :

- 1) Meningkatkan Program Pendidikan Toleransi di Sekolah dan Masyarakat
 - Memasukkan nilai-nilai toleransi, keberagaman, dan anti-diskriminasi dalam kurikulum pendidikan.

- Mengadakan seminar, lokakarya, dan pelatihan tentang toleransi bagi siswa, guru, dan masyarakat umum.
- 2) Membangun Ruang Dialog Antar Kelompok
 - Mengadakan forum diskusi dan dialog lintas agama, suku, dan budaya untuk memperkuat pemahaman dan interaksi yang positif.
 - Menyelenggarakan kegiatan kebudayaan yang melibatkan berbagai komunitas untuk meningkatkan rasa kebersamaan.
 - 3) Mengawasi dan Menindak Tegas Ujaran Kebencian serta Hoaks
 - Memperkuat regulasi dan sistem pemantauan terhadap ujaran kebencian di media sosial dan media massa.
 - Mengedukasi masyarakat agar lebih selektif dalam menerima informasi serta aktif menangkal hoaks.
 - 4) Meningkatkan Peran Pemimpin Daerah dan Tokoh Masyarakat dalam Memperkuat Toleransi
 - Pemerintah daerah, tokoh agama, dan pemuka adat harus menjadi teladan dalam menegakkan nilai-nilai keberagaman.
 - Menjalinkan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk menciptakan kampanye toleransi yang lebih luas.
 - 3) Memastikan Kebijakan Publik yang Mendukung Keberagaman
 - Menyusun regulasi yang memastikan semua kelompok masyarakat memiliki akses yang sama terhadap layanan publik, pendidikan, dan kesempatan kerja.
 - Memastikan tidak ada diskriminasi dalam kebijakan pemerintah terhadap kelompok minoritas.
 - 4) Mengembangkan Kampanye Kesadaran Publik tentang Keberagaman dan Inklusivitas
 - Menggunakan media sosial, televisi, dan kampanye offline untuk menyebarkan pesan-pesan yang memperkuat semangat toleransi.

- Menampilkan kisah sukses dari komunitas yang berhasil hidup berdampingan dengan damai.

V. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan membuat perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran. Kriteria perbandingan yang digunakan dalam analisis efisiensi sebagai berikut:

- Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan atau sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran
- Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan atau sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran.

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Persentase Rata-Rata Capaian Sasaran}}{\text{Persentase Realisasi Anggaran}} \times 100\%$$

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Sasaran	% capaian kinerja sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Meningkatnya Kerukunan dan Ketertiban di Kalangan Masyarakat	Meningkatnya ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat	2	62,45%	57.179.457.660,00	56.248.215.549,00	98%	64%	Tidak Efisien

Pada sasaran strategi meningkatnya ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat terdapat 2 Indikator Daerah dan salah satunya adalah Indeks Toleransi yang dimana capaian kinerjanya hanya mencapai 39% (tidak efisien), sehingga efisiensi penggunaan sumber daya termasuk kedalam kategori tidak efisien, selain itu dalam penentuan

target sasaran Indeks Toleransi ini tidak realistis dan achivable sehingga mempengaruhi tingkat efesiensi per sasaran tersebut.

VI. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

NO	SASARAN	PROGRAM
10	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan di Kalangan Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

11. MENINGKATNYA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN BERINTEGRITAS

1) OPINI BPK

I. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
11	Meningkatnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berintegritas	Opini BPK	WTP	WTP	100%

Untuk tahun 2024 penilaian BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih belum ditetapkan, hal ini disebabkan masih belum keluarnya hasil penilaian dari BPK RI. Untuk penilaian yang ada, digunakan Opini Penilaian Tahun 2023 dimana Kota Palangka Raya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. Kriteria pemberian opini, adalah: (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); (c) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). Keempat jenis opini yang bisa diberikan oleh BPK tersebut dasar pertimbangan utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan SAP. Kewajaran disini bukan berarti kebenaran atas suatu transaksi. Opini atas laporan keuangan tidak mendasarkan kepada apakah pada entitas tertentu terdapat korupsi atau tidak. Hal ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja (sangat tinggi).

II. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021
11	Meningkatnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berintegritas	Opini BPK	WTP	100%	WTP	100%	WTP	100%	WTP	100 %

Opini WTP yang stabil selama empat tahun terakhir (2021-2024) mencerminkan tata kelola keuangan yang transparan dan sesuai standar akuntansi. Meskipun capaian 100% menunjukkan keberhasilan, pemerintah perlu terus melakukan evaluasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Tantangan utama dalam mempertahankan WTP meliputi efisiensi anggaran, risiko administratif, serta keamanan sistem digital dalam pengelolaan keuangan. Peningkatan kualitas SDM, penggunaan teknologi keuangan yang lebih canggih, dan audit internal yang lebih ketat dapat membantu mempertahankan pencapaian ini dalam jangka panjang.

III. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	TARGET 2026	REALISASI 2024
11	Meningkatnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berintegritas	Opini BPK	WTP	WTP

Karena target tahun 2026 juga WTP, maka tantangan ke depan adalah mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan agar tetap memenuhi standar yang ditetapkan oleh BPK.

Realisasi opini WTP pada tahun 2024 telah sesuai dengan target, dan tantangan utama adalah mempertahankan pencapaian ini di tahun 2026. Memastikan tata kelola keuangan yang tetap transparan, akuntabel, dan efektif menjadi kunci utama dalam menjaga opini WTP di tahun-tahun mendatang. Selain itu, penting untuk tidak hanya berfokus pada pencapaian WTP, tetapi juga memastikan bahwa anggaran benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat secara optimal.

IV. Analisis penyebab dari keberhasilan atau kegagalan serta peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Ada beberapa faktor utama yang mungkin berkontribusi terhadap keberhasilan capaian Opini BPK yakni WTP antara lain:

- ✓ Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintah akan lebih mudah memenuhi syarat WTP.
- ✓ Pemerintah daerah kemungkinan telah menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif untuk mencegah kesalahan atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.
- ✓ Adanya komitmen pemerintah daerah untuk menyajikan laporan keuangan secara terbuka dan akurat.
- ✓ Pemerintah daerah mungkin mendapat pelatihan dan pendampingan terkait penyusunan laporan keuangan sesuai dengan peraturan.
- ✓ Tertib administrasi dalam pencatatan aset daerah juga menjadi faktor penting dalam penilaian WTP.
- ✓ Fungsi Inspektorat dalam melakukan pengawasan internal berkontribusi dalam memastikan pengelolaan keuangan sesuai dengan aturan.
- ✓ Dukungan penuh dari pimpinan daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Alternatif Solusi untuk Mempertahankan dan Meningkatkan Opini WTP antara lain :

- ✓ Peningkatan kapasitas SDM di bidang akuntansi dan pengelolaan keuangan dengan cara melakukan pelatihan dan sertifikasi secara berkala kepada aparatur pemerintah di bidang keuangan.

- ✓ Digitalisasi sistem akuntansi dan pengelolaan aset dengan cara pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah pencatatan aset, transaksi keuangan, dan penyusunan laporan.
- ✓ Penguatan pengendalian internal melalui Inspektorat dengan cara memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Inspektorat untuk melakukan audit internal secara berkala.
- ✓ Sistem manajemen risiko yang lebih baik melalui pengidentifikasian dan memitigasi risiko dalam pengelolaan anggaran dan aset daerah.
- ✓ Optimalisasi transparansi pengelolaan hibah dan bansos dengan cara membangun sistem pelaporan hibah dan bantuan sosial yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat.
- ✓ Audit mandiri sebelum pemeriksaan BPK dengan cara melakukan audit internal secara menyeluruh sebelum laporan keuangan diaudit oleh BPK untuk mendeteksi potensi kesalahan lebih awal.

V. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan membuat perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran. Kriteria perbandingan yang digunakan dalam analisis efisiensi sebagai berikut:

- a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan atau sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasara
- b. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan atau sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran.

Tingkat Efisiensi =	$\frac{\text{Persentase Rata-Rata Capaian Sasaran}}{\text{Persentase Realisasi Anggaran}} \times 100\%$
----------------------------	---

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Sasaran	% capaian kinerja sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas	4	110,06%	219.890.664.910,00	203.618.609.462,89	93%	118%	Efisien

VI. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

NO	SASARAN	PROGRAM
11	Meningkatnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berintegritas	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

2) NILAI SAKIP

I. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
11	Meningkatnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berintegritas	Nilai SAKIP	BB (70,01)	B (64,85)	93%

Pada Tahun 2024 target Nilai SAKIP yang ditetapkan dalam RPD yakni predikat BB (Nilai terendah 70,01) dengan realisasi yang diperoleh yakni predikat B (64,85) dengan capaian sebesar 93% dimana nilai tersebut diperoleh dari perbandingan Nilai terendah predikat BB dibandingkan dengan nilai capaian tahun 2024. Untuk trend peningkatan nilai SAKIP Kota Palangka Raya memang tidak meningkat secara signifikan dari tahun sebelumnya namun diharapkan seluruh Perangkat Daerah dan pimpinan Daerah harus berkomitmen penuh dalam peningkatan kualitas SAKIP di Kota Palangka Raya. Hal ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja (sangat tinggi).

II. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021
11	Meningkatnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berintegritas	Nilai SAKIP	B (64,85)	93%	B (62,08)	100%	B (61,69)	100%	B (60,03)	100 %

Nilai SAKIP stabil dengan predikat B selama 2021-2024, tetapi capaian mengalami sedikit penurunan di 2024 menjadi 93%, hal ini disebabkan karena pada tahun 2024 target yang ingi dicapai ialah kategori BB. Penurunan capaian ini bisa disebabkan oleh efektivitas program yang kurang maksimal, evaluasi yang lebih ketat, atau kurangnya inovasi dalam tata kelola pemerintahan. Meskipun masih dalam kategori baik, ada peluang besar untuk meningkatkan nilai ke level BB atau A dengan perbaikan dalam efisiensi anggaran, evaluasi kinerja, serta penerapan teknologi dalam tata kelola pemerintahan. Dengan strategi yang tepat, pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja dan memperbaiki nilai SAKIP di tahun-tahun mendatang.

III. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	TARGET 2026	REALISASI 2024
11	Meningkatnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berintegritas	Nilai SAKIP	BB (75,00)	B (64,85)

Karena target untuk 2025 dan 2026 tetap kategori BB, maka perlu dilakukan peningkatan signifikan dalam manajemen kinerja instansi pemerintah agar target dapat tercapai. Jika tren kinerja tidak ditingkatkan, ada risiko bahwa target BB tidak akan tercapai di tahun-tahun mendatang.

Realisasi kategori B pada tahun 2024 belum memenuhi target kategori BB, yang menunjukkan masih adanya tantangan dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk mencapai target BB pada tahun 2025 dan 2026, perlu dilakukan perbaikan dalam perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, efektivitas anggaran, serta pengawasan internal. Dengan implementasi strategi yang lebih kuat, peluang untuk mencapai kategori BB masih sangat terbuka, tetapi membutuhkan komitmen dan perbaikan berkelanjutan.

IV. Membandingkan Realisasi kinerja tahun ini dengan standard Nasional

Perbandingan Nilai SAKIP 64,85 dengan Standar Nasional 64,23

Aspek	Realisasi (64,85)	Standar Nasional (64,23)	Perbandingan
Nilai SAKIP	64,85	64,23	Lebih tinggi 0,62 poin
Kategori Kinerja	Masih dalam kategori "B" (Baik)	Juga dalam kategori "B" (Baik)	Hampir setara
Efisiensi dan Akuntabilitas Anggaran	Lebih baik dari nasional	Sedikit lebih rendah	Ada keunggulan dalam tata kelola pemerintahan
Implementasi Reformasi Birokrasi	Relatif lebih optimal	Masih dalam tahap perbaikan	Perlu peningkatan lebih lanjut
Faktor Penyebab	Perencanaan, pengawasan, efektivitas kebijakan	Standar nasional lebih umum	Bisa menjadi contoh daerah lain

Nilai SAKIP 64,85 sedikit lebih tinggi dibandingkan standar nasional 64,23, menunjukkan bahwa akuntabilitas pemerintahan di wilayah ini lebih baik dari rata-rata nasional.

Keunggulan yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan:

- Pengelolaan anggaran yang lebih efisien untuk meningkatkan nilai SAKIP.
- Penyederhanaan birokrasi dan peningkatan layanan publik berbasis digital untuk transparansi dan efektivitas.
- Penguatan pengawasan internal untuk memastikan program kerja sesuai dengan perencanaan.

V. Analisis penyebab dari keberhasilan atau kegagalan serta peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Beberapa faktor yang kemungkinan berkontribusi terhadap tidak tercapainya target Nilai SAKIP antara lain :

- ✓ Masih terdapat kelemahan dalam perencanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja di berbagai instansi pemerintahan daerah.
- ✓ Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) belum sepenuhnya selaras dengan hasil yang ingin dicapai (outcome-oriented).
- ✓ Dalam sistem SAKIP, efektivitas penggunaan anggaran harus dikaitkan langsung dengan capaian kinerja. Jika masih ada ketidaksesuaian, maka nilai SAKIP akan terpengaruh.
- ✓ Indikator kinerja yang kurang relevan atau belum sepenuhnya SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) sehingga masih ada indikator kinerja yang terlalu umum atau sulit diukur dampaknya.

- ✓ Efektivitas belanja daerah mungkin belum sepenuhnya berbasis hasil (outcome-based budgeting), sehingga masih ada kesenjangan antara anggaran dan capaian kinerja.
- ✓ Evaluasi dan monitoring yang belum sepenuhnya efektif dimana jika evaluasi internal terhadap capaian kinerja kurang tajam, maka perbaikan yang dibutuhkan untuk peningkatan nilai SAKIP menjadi BB tidak dapat dilakukan secara optimal.
- ✓ Kategori BB biasanya diperoleh jika kepala daerah dan pimpinan OPD sangat berkomitmen dalam pengelolaan kinerja berbasis hasil.

Alternatif Solusi untuk Meningkatkan Nilai SAKIP ke Kategori BB dengan beberapa cara yaitu :

- ✓ Penyusunan indikator kinerja harus lebih terukur dan berorientasi pada hasil (outcome), bukan sekadar output kegiatan.
- ✓ Menyelaraskan anggaran dengan kinerja berbasis hasil (Outcome-Based Budgeting) hal ini berarti penggunaan anggaran harus lebih transparan dan dikaitkan langsung dengan manfaat bagi masyarakat.
- ✓ Peningkatan kapasitas SDM dalam manajemen kinerja melalui pelatihan dan bimbingan teknis terkait perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perlu diperkuat agar aparatur lebih kompeten.
- ✓ Kepala daerah dan pimpinan OPD harus lebih aktif dalam memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar berdampak pada peningkatan kinerja pemerintah.
- ✓ Implementasi sistem informasi yang mendukung pengelolaan kinerja berbasis digital dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengukuran kinerja.

- ✓ Program reformasi birokrasi harus terus ditingkatkan dengan menambahkan inovasi dalam sistem manajemen pemerintahan yang lebih efisien dan transparan.
- ✓ Koordinasi yang lebih baik dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dapat membantu dalam merancang strategi peningkatan nilai SAKIP.

VI. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan membuat perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran. Kriteria perbandingan yang digunakan dalam analisis efisiensi sebagai berikut:

- a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan atau sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasara
- b. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan atau sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran.

Tingkat Efisiensi =	$\frac{\text{Persentase Rata-Rata Capaian Sasaran}}{\text{Persentase Realisasi Anggaran}} \times 100\%$
----------------------------	---

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Sasaran	% capaian kinerja sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningktanya pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas	4	110,06%	219.890.664.910,00	203.618.609.462,89	93%	118%	Efisien

VII. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

NO	SASARAN	PROGRAM
11	Meningkatnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berintegritas	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

3) INDEKS PROFESIONALISME ASN

I. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
11	Meningkatnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berintegritas	Indeks Profesionalisme ASN	Kategori Sangat Rendah (70,00)	Kategori Tinggi (81,11)	116%

Indeks profesionalisme ASN Kota Palangka Raya tahun 2024 mencapai predikat tinggi. Pemerintah Kota Palangka Raya berhasil meraih Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) yang tinggi, menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, sebanyak 23 ASN Pemko Palangka Raya menerima penghargaan Indeks Profesional ASN pada 25 September 2024, menunjukkan pengakuan atas dedikasi dan profesionalisme mereka.

Pencapaian kategori *tinggi* dalam Indeks Profesionalisme ASN, meskipun target awalnya berada pada kategori *sangat rendah*, merupakan bukti

nyata bahwa reformasi manajemen SDM, peningkatan evaluasi kinerja, serta inovasi digital telah memberikan dampak positif yang signifikan. Keberhasilan ini sebaiknya dijadikan momentum untuk menetapkan standar dan target yang lebih tinggi, sekaligus memastikan bahwa peningkatan profesionalisme ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan di masa depan demi pelayanan publik yang lebih optimal. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan yang dilakukan telah menghasilkan perbaikan substansial dalam kinerja ASN. Selanjutnya, upaya harus difokuskan pada penguatan sistem yang telah ada dan penetapan target yang lebih ambisius guna mendukung reformasi birokrasi secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja (sangat tinggi).

II. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021
11	Meningkatnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berintegritas	Indeks Profesionalisme ASN	Kategori Tinggi (81,11)	116 %	Berbeda IKU antara RPJMD 2018-2023 dengan RPD 2024-2026					

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya periode 2024-2026 Indikator Daerah Indeks Profesionalisme ASN tidak memiliki perbandingan dengan tahun tahun sebelumnya, dikarenakan Indikator ini merupakan Indikator Daerah baru yang tidak terdapat pada RPJMD lalu. Indikator Indeks Profesionalisme ASN yang diampu oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tahun 2021,2022 dan 2023 berbeda dengan indikator yang ada, dimana indikator dokumen RPJMD adalah:

Indikator	Realisasi 2023	Capaian 2023	Realisasi 2022	Capaian 2022	Realisasi 2021	Capaian 2021
Indeks Reformasi Birokrasi	B (65,07)	100%	B (60,30)	100%	CC (50,08)	100%

Pada tahun 2021 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi target adalah CC, capaian realisasinya CC pada tahun 2022 dengan target CC mengalami peningkatan capaian realisasi B sedangkan tahun 2023 target B mendapatkan capaian realisasi B. Adapun predikat tersebut didukung dengan tindaklanjut Perangkat daerah yang ditunjuk sebagai sampel dalam Penilaian Reformasi Birokrasi dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan Kementerian PAN RB.

III. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	TARGET 2026	REALISASI 2024
11	Meningkatnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berintegritas	Indeks Profesionalisme ASN	Kategori Sedang (80,00)	Kategori Tinggi (81,11)

Jika tren peningkatan profesionalisme ASN dapat dipertahankan, maka target untuk tahun 2026 sangat mungkin terlampaui lebih cepat. Dengan realisasi 2024 yang sudah mencapai kategori Tinggi, seharusnya target untuk tahun-tahun mendatang disesuaikan dan ditingkatkan agar tetap relevan dengan kondisi terkini.

Realisasi Indeks Profesionalisme ASN tahun 2024 berada dalam kategori Tinggi, jauh melampaui target yang hanya Sangat Rendah. Ini menunjukkan bahwa ada peningkatan yang sangat signifikan dalam profesionalisme ASN dibandingkan ekspektasi awal. Oleh karena itu, target tahun 2026 sebaiknya direvisi agar lebih menantang dan sesuai dengan kondisi terkini.

Tantangan utama ke depan adalah mempertahankan pencapaian ini serta meningkatkan standar profesionalisme ASN melalui pelatihan,

sistem merit, digitalisasi, dan insentif berbasis kinerja. Dengan strategi yang tepat, ASN dapat semakin profesional dan berkontribusi lebih besar terhadap pelayanan publik yang lebih baik.

IV. Analisis penyebab dari keberhasilan atau kegagalan serta peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Ada beberapa faktor utama yang mungkin berkontribusi terhadap keberhasilan capaian Indeks Profesionalisme ASN antara lain:

- ✓ Adanya pelatihan dan pengembangan kompetensi yang lebih efektif berkontribusi pada peningkatan profesionalisme ASN.
- ✓ Perbaikan dalam sistem manajemen ASN melalui kebijakan yang lebih transparan dan berbasis kinerja.
- ✓ Seleksi, promosi, dan mutasi ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan faktor non-profesional seperti kedekatan politik atau hubungan pribadi.
- ✓ Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan ASN, seperti Sistem Informasi ASN (SIASN), membantu meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pegawai negeri.
- ✓ Fokus pada pencapaian hasil dan evaluasi berbasis capaian kinerja meningkatkan profesionalisme ASN.
- ✓ Adanya mekanisme pengawasan serta penerapan sanksi bagi ASN yang melanggar kode etik membantu meningkatkan standar profesionalisme.
- ✓ Komitmen dari pimpinan daerah dan kepala OPD dalam mendorong peningkatan kompetensi ASN melalui program pelatihan dan pembinaan.

Alternatif Solusi untuk Mempertahankan dan Meningkatkan Indeks

Profesionalisme ASN

- ✓ Meningkatkan sistem pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN melalui penyesuaian program pelatihan dengan kebutuhan zaman, seperti pelatihan digitalisasi, kepemimpinan, dan layanan publik berbasis teknologi.
- ✓ Memastikan bahwa seleksi, promosi, dan mutasi ASN tetap berbasis kinerja dan kompetensi.
- ✓ Pemanfaatan teknologi dalam manajemen ASN dengan cara penggunaan sistem berbasis digital seperti e-learning untuk pelatihan dan evaluasi kinerja ASN.
- ✓ Meningkatkan budaya kerja yang inovatif dan adaptif dengan cara mendorong ASN untuk lebih terbuka terhadap inovasi dan perubahan dalam sistem kerja.
- ✓ Peningkatan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja ASN dengan cara memastikan adanya mekanisme yang lebih ketat dalam pengukuran profesionalisme ASN secara berkala.
- ✓ Peningkatan peran kepemimpinan dalam pembinaan ASN dengan cara Kepala daerah dan pimpinan OPD harus lebih aktif dalam memberikan arahan dan teladan dalam profesionalisme kerja.

V. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan membuat perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran. Kriteria perbandingan yang digunakan dalam analisis efisiensi sebagai berikut:

- a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan atau sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasara

- b. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan atau sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran.

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Persentase Rata-Rata Capaian Sasaran}}{\text{Persentase Realisasi Anggaran}} \times 100\%$$

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Sasaran	% capaian kinerja sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningktanya pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas	4	110,06%	219.890.664.910,00	203.618.609.462,89	93%	118%	Efisien

VI. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

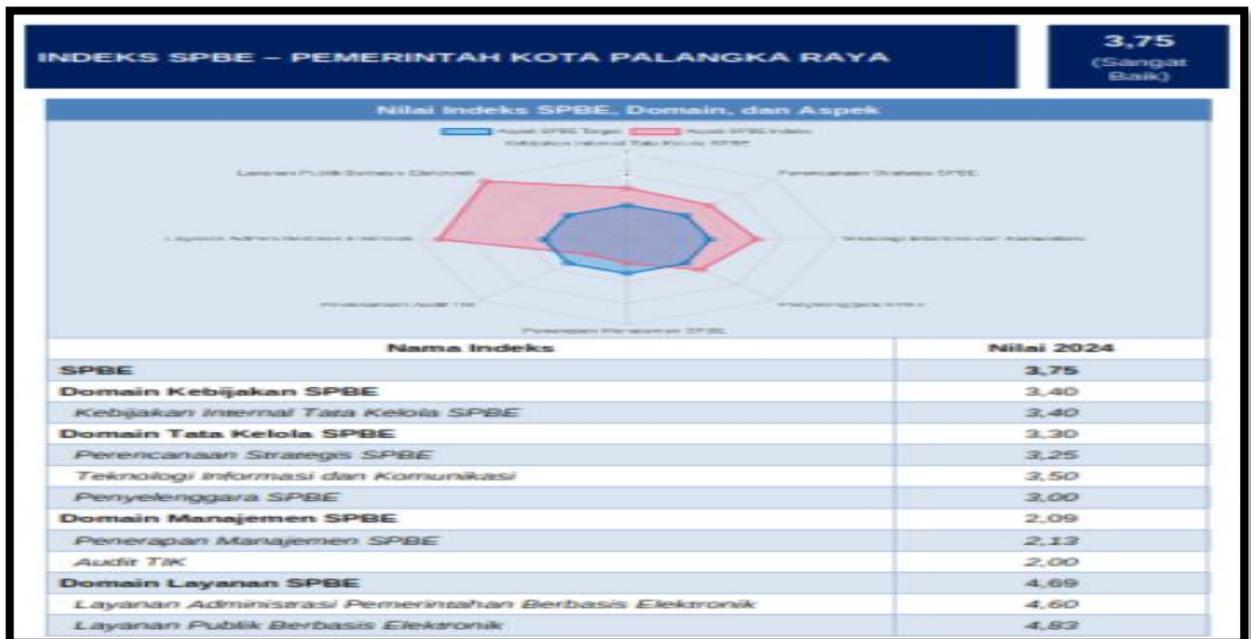
NO	SASARAN	PROGRAM
11	Meningkatnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berintegritas	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

4) INDEKS SPBE

I. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
11	Meningkatnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berintegritas	Indeks SPBE	2,75	3,75	136%

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.



Indeks SPBE yang di targetkan pada tahun ini dengan indeks sebesar 2,75 dan telah mencapai realisasi sebesar 3,75 atau persentase capainnya sebanyak 136%. Hal ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja (sangat tinggi).

II. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021
11	Meningkatnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berintegritas	Indeks SPBE	3,75	136%	Berbeda IKU antara RPJMD 2018-2023 dengan RPD 2024-2026					

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya periode 2024-2026 Indikator Daerah Indeks SPBE tidak memiliki perbandingan dengan tahun tahun sebelumnya, dikarenakan Indikator ini merupakan Indikator Daerah baru yang tidak terdapat pada RPJMD lalu. Indikator Indeks SPBE yang diampu oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian pada tahun 2021,2022 dan 2023 berbeda dengan indikator yang ada, dimana indikator dokumen RPJMD adalah:

Indikator	Realisasi 2023	Capaian 2023	Realisasi 2022	Capaian 2022	Realisasi 2021	Capaian 2021
Persentase Wilayah (Kelurahan) yang Terkoneksi Jaringan Internet (TI)	76%	100%	73%	104%	63%	100%

Pada RPJMD Kota Palangka Raya, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dan Persentase Wilayah (Kelurahan) yang Terkoneksi Jaringan Internet (TI) sehingga untuk perbandingan dengan tahun 2024 yang menggunakan dokumen RPD mengalami kendala.

III. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	TARGET 2026	REALISASI 2024
11	Meningkatnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berintegritas	Indeks SPBE	2,9	3,75

Dengan pencapaian 3,75 pada tahun 2024, target untuk tahun 2026 sebaiknya direvisi agar lebih sesuai dengan perkembangan yang telah terjadi. Jika target tetap 2,90, maka ini tidak lagi relevan dengan kemajuan yang sudah dicapai.

Realisasi Indeks SPBE tahun 2024 mencapai 3,75, jauh melebihi target awal yang hanya 2,75. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi pemerintahan telah berkembang lebih pesat dari yang direncanakan. Oleh karena itu, target tahun 2026 perlu direvisi agar lebih ambisius dan sesuai dengan pencapaian yang sudah ada.

Ke depan, tantangan utama adalah mempertahankan momentum digitalisasi ini, dengan terus memperkuat infrastruktur teknologi, meningkatkan keamanan data, mengintegrasikan layanan digital, serta meningkatkan kapasitas ASN dan partisipasi masyarakat dalam e-government. Dengan strategi yang tepat, Indeks SPBE dapat terus meningkat dan menjadikan pemerintahan lebih efisien, transparan, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

IV. Membandingkan Realisasi kinerja tahun ini dengan standard Nasional

Perbandingan Indeks SPBE 3,75 dengan Standar Nasional 3,12

Aspek	Realisasi (3,75)	Standar Nasional (3,12)	Perbandingan
Indeks SPBE	3,75	3,12	Lebih tinggi 0,63 poin
Kategori Penilaian	Baik	Cukup	Wilayah ini lebih unggul
Implementasi Layanan Digital	Lebih luas	Masih berkembang	Wilayah lebih digitalisasi
Integrasi Data dan Aplikasi	Lebih optimal	Masih berproses	Wilayah lebih maju dalam interoperabilitas sistem
Keamanan dan Tata Kelola TI	Lebih matang	Masih perlu perbaikan	Lebih baik dalam aspek regulasi dan perlindungan data
Faktor Penyebab	Infrastruktur TI, SDM yang lebih kompeten, dukungan kebijakan	Rata-rata nasional masih dalam tahap penguatan	Bisa menjadi percontohan nasional

Indeks SPBE 3,75 lebih tinggi dibandingkan standar nasional 3,12, yang berarti wilayah ini lebih maju dalam penerapan digitalisasi pemerintahan.

Keunggulan yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan:

- Memperluas digitalisasi layanan publik untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat.
- Meningkatkan keamanan sistem TI agar data masyarakat lebih aman.
- Mendorong inovasi teknologi agar SPBE semakin berkembang dan lebih unggul dari daerah lain.

V. Analisis penyebab dari keberhasilan atau kegagalan serta peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Ada beberapa faktor utama yang mungkin berkontribusi terhadap keberhasilan capaian Indeks SPBE antara lain:

- ✓ Peningkatan indeks SPBE menunjukkan adanya komitmen kuat dari pemerintah daerah dalam menerapkan sistem berbasis elektronik untuk pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.
- ✓ Kemajuan dalam pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak, serta penguatan jaringan internet di berbagai sektor pemerintahan, berkontribusi terhadap peningkatan indeks SPBE.
- ✓ Adanya platform digital yang semakin terintegrasi antara berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau instansi pemerintahan lainnya telah meningkatkan efisiensi layanan publik.
- ✓ Implementasi kebijakan yang mendukung SPBE, seperti peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait digitalisasi layanan, telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk meningkatkan penerapan SPBE.
- ✓ ASN dan tenaga teknis yang terlibat dalam pengelolaan SPBE mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis yang meningkatkan kompetensi mereka dalam menerapkan teknologi digital.
- ✓ Adopsi teknologi cloud computing, database terpusat, dan analitik big data membantu pemerintah dalam mengelola data lebih efisien dan meningkatkan interoperabilitas sistem.
- ✓ Kemitraan dengan perusahaan teknologi dan institusi pendidikan dalam mengembangkan aplikasi atau sistem berbasis elektronik memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas SPBE.
- ✓ Adanya upaya untuk memperkuat keamanan data dan perlindungan siber dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik

meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap layanan digital pemerintahan.

Alternatif Solusi untuk Mempertahankan dan Meningkatkan Indeks SPBE antara lain :

- ✓ Memastikan peraturan daerah atau kebijakan pemerintah daerah mendukung implementasi SPBE secara optimal dan berkelanjutan.
- ✓ Mengembangkan sistem yang lebih terintegrasi antar OPD dan pemerintahan pusat agar layanan lebih efektif dan efisien.
- ✓ Melanjutkan pelatihan teknis dan literasi digital bagi ASN agar lebih siap mengelola dan menggunakan sistem elektronik dalam pelayanan publik.
- ✓ Menyediakan infrastruktur keamanan siber yang lebih kuat untuk melindungi data pemerintahan dan mencegah ancaman siber yang berpotensi merugikan layanan publik.
- ✓ Mengadopsi teknologi cloud dan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data dan layanan digital pemerintahan.
- ✓ Mendorong masyarakat untuk lebih aktif menggunakan layanan pemerintahan berbasis elektronik, seperti e-government, e-KTP, e-health, dan e-payment.
- ✓ Melakukan audit berkala terhadap implementasi SPBE serta mendorong inovasi dalam sistem layanan digital agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.
- ✓ Membangun kemitraan yang lebih kuat dengan sektor swasta dan akademisi dalam pengembangan teknologi dan peningkatan kualitas layanan digital pemerintahan.

VI. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan membuat perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran. Kriteria perbandingan yang digunakan dalam analisis efisiensi sebagai berikut:

- Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan atau sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran
- Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan atau sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran.

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Persentase Rata-Rata Capaian Sasaran}}{\text{Persentase Realisasi Anggaran}} \times 100\%$$

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Sasaran	% capaian kinerja sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meninggkatnya pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas	4	110,06%	219.890.664.910,00	203.618.609.462,89	93%	118%	Efisien

VII. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

NO	SASARAN	PROGRAM
11	Meningkatnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berintegritas	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

NO	SASARAN	PROGRAM
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

12. MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN DAERAH

1) INDEKS PERENCANAAN DAERAH

I. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
12	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah	Indeks Perencanaan Daerah	90%	96%	111%

Indeks Perencanaan Daerah merupakan indikator yang mengukur kualitas, komprehensifitas, dan efektivitas proses perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Indeks ini mencakup penyusunan rencana strategis, program, dan anggaran yang sejalan dengan visi, misi, serta prioritas pembangunan daerah. Target 90% menunjukkan standar minimal yang diharapkan untuk tercapainya perencanaan yang berkualitas, sedangkan capaian 100% berarti bahwa seluruh aspek perencanaan telah memenuhi atau bahkan melampaui standar yang ditetapkan. Pencapaian Indeks Perencanaan Daerah sebesar 100% melampaui target 90% merupakan indikasi keberhasilan yang signifikan dalam upaya perencanaan pembangunan daerah.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mampu menyusun rencana yang komprehensif, terintegrasi, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta aspirasi masyarakat.

Untuk menjaga dan meningkatkan standar ini, perlu diimbangi dengan implementasi yang efektif, evaluasi berkala, serta peningkatan partisipasi semua pihak agar rencana pembangunan dapat terealisasi dengan optimal dan berkelanjutan.

Hal ini menjadi acuan positif bagi pembuat kebijakan untuk terus mempertahankan dan mengembangkan kualitas perencanaan daerah demi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan pembangunan di masa mendatang.

II. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021
12	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah	Indeks Perencanaan Daerah	100%	111%	Berbeda IKU antara RPJMD 2018-2023 dengan RPD 2024-2026					

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya periode 2024-2026 Indikator Daerah Indeks Perencanaan Daerah tidak memiliki perbandingan dengan tahun tahun sebelumnya, dikarenakan Indikator ini merupakan Indikator Daerah baru yang tidak terdapat pada RPJMD lalu. Indikator Indeks Perencanaan Daerah yang diampu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2021,2022 dan 2023 berbeda dengan indikator yang ada, dimana indikator dokumen RPJMD adalah:

Indikator	Realisasi 2023	Capaian 2023	Realisasi 2022	Capaian 2022	Realisasi 2021	Capaian 2021
Indeks Reformasi Birokrasi	B (65,07)	100%	B (60,30)	100%	CC (50,08)	100%

Pada tahun 2021 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi target adalah CC, capaian realisasinya CC pada tahun 2022 dengan target CC mengalami peningkatan capaian realisasi B sedangkan tahun 2023 target B mendapatkan capaian realisasi B. Adapun predikat tersebut didukung dengan tindaklanjut Perangkat daerah yang ditunjuk sebagai sampel dalam Penilaian Reformasi Birokrasi dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan Kementerian PAN RB.

III. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	TARGET 2026	REALISASI 2024
12	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah	Indeks Perencanaan Daerah	90%	100%

Dengan realisasi 100% di tahun 2024, sementara target tahun 2026 tetap di 90%, berarti standar perencanaan daerah yang sudah dicapai saat ini berada di atas ekspektasi jangka menengah. Hal ini dapat menjadi dasar untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas perencanaan daerah agar tetap berada pada tingkat yang optimal. Realisasi Indeks Perencanaan Daerah tahun 2024 mencapai 100%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 90%. Ini menunjukkan bahwa perencanaan daerah sudah berjalan dengan sangat baik, dengan standar kualitas yang tinggi.

Ke depan, tantangan utama adalah memastikan bahwa kualitas perencanaan ini tetap terjaga, serta memastikan implementasi kebijakan yang telah dirancang benar-benar terealisasi di lapangan. Dengan strategi yang tepat, pemerintah daerah dapat terus mempertahankan perencanaan yang berkualitas tinggi dan berdampak nyata bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

IV. Analisis penyebab dari keberhasilan atau kegagalan serta peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Ada beberapa faktor utama yang mungkin berkontribusi terhadap keberhasilan capaian Indeks Perencanaan Daerah antara lain:

- ✓ Penyusunan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), dan Renstra OPD (Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah) dilakukan dengan lebih baik, sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan yang efektif.
- ✓ Perencanaan daerah semakin terintegrasi dengan kebijakan nasional, seperti RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), sehingga memastikan keselarasan kebijakan pembangunan dari pusat hingga daerah.

- ✓ Penguatan Kapasitas SDM Perencana Daerah dengan cara ASN dan tenaga perencana daerah mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis yang lebih intensif sehingga kualitas perencanaan meningkat.
- ✓ Pemanfaatan Teknologi dalam Perencanaan dengan cara digitalisasi perencanaan melalui penggunaan aplikasi e-Planning dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) membantu meningkatkan efektivitas penyusunan, pemantauan, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.
- ✓ Melibatkan masyarakat, akademisi, dan sektor swasta dalam penyusunan perencanaan melalui musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) meningkatkan akurasi dan relevansi perencanaan daerah.
- ✓ Keterlibatan aktif seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan rencana pembangunan daerah membantu menciptakan perencanaan yang lebih terpadu dan efektif.
- ✓ Perencanaan berbasis data dan penggunaan indikator kinerja dalam perencanaan memungkinkan evaluasi yang lebih objektif dan akurat.
- ✓ Implementasi aturan yang lebih ketat dalam penyusunan dokumen perencanaan memastikan seluruh tahapan perencanaan daerah dilakukan dengan standar yang tinggi.

Alternatif Solusi untuk Mempertahankan dan Meningkatkan Indeks Perencanaan Daerah

- ✓ Memastikan Implementasi Perencanaan yang Konsisten dan Berkelanjutan dengan cara mengawal proses implementasi agar sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disusun, dengan memastikan koordinasi antar OPD tetap berjalan efektif.

- ✓ Meningkatkan Sistem Evaluasi dan Pemantauan Berbasis Digital melalui pemanfaatan sistem e-Monitoring dan e-Evaluasi untuk memastikan rencana yang telah disusun dapat diimplementasikan dengan baik dan tepat sasaran.
- ✓ Meningkatkan Fleksibilitas Perencanaan melalui penerapan skema perencanaan yang lebih adaptif terhadap perubahan kondisi eksternal seperti perubahan ekonomi, kebijakan nasional, atau bencana alam.
- ✓ Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan sektor swasta dalam mengawal implementasi program pembangunan daerah agar lebih efektif dan transparan.
- ✓ Menggunakan data real-time dalam penyusunan rencana agar perencanaan lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- ✓ Peningkatan Transparansi dalam Penyusunan dan Implementasi Perencanaan melalui penggunaan platform digital yang dapat diakses publik untuk memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- ✓ Mengembangkan strategi pendanaan alternatif seperti kerja sama dengan swasta (Public-Private Partnership) untuk mendukung implementasi rencana pembangunan.
- ✓ Peningkatan Kapasitas SDM Perencana Daerah Secara Berkelanjutan dengan cara pengadaan pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga perencana daerah untuk memastikan kompetensi mereka tetap relevan dengan perkembangan zaman.

V. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan membuat perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran. Kriteria perbandingan yang digunakan dalam analisis efisiensi sebagai berikut:

- a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan atau sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasara
- b. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan atau sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran.

Tingkat Efisiensi =	$\frac{\text{Persentase Rata-Rata Capaian Sasaran}}{\text{Persentase Realisasi Anggaran}} \times 100\%$
----------------------------	---

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Sasaran	% capaian kinerja sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas perencanaan daerah	1	111%	19.494.772.155,00	18.381.683.720,00	94%	118%	Efisien

VI. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

NO	SASARAN	PROGRAM
12	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

13. TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS

1) IKM

I. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
13	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas	IKM	B (86,13)	B (86,13)	100%

Pada Tahun 2024 Survei Kepuasan Masyarakat di Kota Palangka Raya dilaksanakan dalam 1 (satu) periode. Nilai IKM Kota Palangka Raya pada Tahun 2024 sebesar **86,13** dengan kategori nilai **B (Baik)**. Jumlah Responden dalam penyelenggaraan SKM di Tahun 2024 merupakan hasil penjumlahan responden pada survei yang dilaksanakan unit penyelenggara pelayanan/perangkat daerah pada tahun 2024. Secara keseluruhan jumlah responden masyarakat yang berpartisipasi dalam SKM tahun 2024 sebanyak 7.562 jiwa/orang. Penyelenggaraan SKM Kota Palangka Raya Tahun 2024 dilakukan dengan metode kombinasi Manual dan Online. Penggunaan metode online sebagai upaya mempermudah dan mempercepat layanan dengan menggunakan teknologi, sedangkan penggunaan metode manual dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat yang memang melakukan pelayanan di lapangan dan memiliki kendala penggunaan teknologi. Berdasarkan target yang ditetapkan, realisasi dan capaian untuk IKM Kota Palangka Raya yakni 100%. Hal ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja (sangat tinggi).

II. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021
13	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas	IKM	B (86,13)	100%	B (84,50)	75%	B (80,75)	82,05 %	B (80,43)	100 %

IKM selama 2021-2024 tetap berada di kategori B (Baik), tetapi capaian mengalami fluktuasi dengan penurunan di 2023 (75%) dan pemulihan di 2024 (100%). Penurunan di 2023 bisa disebabkan oleh kualitas layanan yang tidak konsisten, keterbatasan SDM, dan kurangnya inovasi dalam pelayanan.

Pemulihan capaian di 2024 menunjukkan adanya perbaikan dalam pelayanan, tetapi masih ada tantangan dalam menjaga konsistensi ke depannya.

Untuk meningkatkan mutu pelayanan ke kategori A (Sangat Baik), pemerintah perlu meningkatkan standar layanan, digitalisasi, serta sistem umpan balik dan respons terhadap Masyarakat.

III. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	TARGET 2026	REALISASI 2024
13	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas	IKM	A (88,31)	B (86,13)

Dengan target tahun 2026 meningkat ke kategori A, berarti tahun 2025 menjadi masa transisi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar siap mencapai kategori A di 2026.

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 mencapai kategori B, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun, untuk mencapai kategori A pada tahun 2026, perlu ada strategi peningkatan yang lebih agresif, terutama dalam digitalisasi layanan, peningkatan kualitas SDM ASN, respons terhadap keluhan, serta transparansi layanan publik.

Dengan strategi yang tepat, mutu pelayanan dapat ditingkatkan secara bertahap, sehingga target kategori A pada tahun 2026 dapat tercapai dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam bentuk pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan profesional.

IV. Analisis penyebab dari keberhasilan atau kegagalan serta peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Ada beberapa faktor utama yang mungkin berkontribusi terhadap keberhasilan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat antara lain:

- ✓ Pelayanan publik telah berjalan sesuai standar yang ditetapkan, meskipun belum mencapai kategori yang lebih tinggi.
- ✓ Masyarakat memiliki akses untuk menyampaikan keluhan atau masukan terkait layanan, yang membantu instansi memperbaiki kualitas pelayanan.
- ✓ Penyediaan fasilitas yang memadai, seperti loket layanan, sistem antrean digital, dan sarana pendukung lainnya, membantu menjaga mutu layanan di tingkat yang stabil.
- ✓ Penggunaan layanan digital dan e-government meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan publik, meskipun masih bisa dioptimalkan lebih lanjut.
- ✓ Pemerintah daerah telah memenuhi Standar Pelayanan Minimum dalam berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan.
- ✓ Kompetensi SDM Pelayanan Publik melalui ASN dan petugas pelayanan telah mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kualitas layanan, namun mungkin belum optimal dalam aspek keramahan, kecepatan, dan efektivitas layanan.

Alternatif Solusi untuk Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat antara lain :

- ✓ Meningkatkan kualitas layanan dengan mempercepat waktu pelayanan, meningkatkan profesionalisme petugas, serta mengurangi birokrasi yang berbelit.
- ✓ Memastikan bahwa sistem pengaduan masyarakat lebih responsif dengan batas waktu penyelesaian yang jelas dan evaluasi berkala terhadap penanganan keluhan.
- ✓ Mengembangkan layanan berbasis digital yang lebih user-friendly, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan dengan lebih mudah dan cepat.
- ✓ Menjamin bahwa standar pelayanan yang diterapkan di setiap instansi memiliki mutu yang seragam, agar tidak ada perbedaan signifikan dalam kepuasan masyarakat antar unit layanan.
- ✓ Memberikan pelatihan berkelanjutan bagi ASN dan petugas layanan untuk meningkatkan keterampilan dalam melayani masyarakat dengan lebih baik.
- ✓ Melakukan sosialisasi yang lebih masif tentang hak-hak masyarakat dalam mendapatkan layanan, prosedur pelayanan, serta kanal pengaduan yang dapat digunakan.
- ✓ Memastikan ketersediaan fasilitas yang ramah bagi semua kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya.
- ✓ Melakukan survei kepuasan masyarakat secara lebih detail dan berkala untuk mengetahui aspek layanan mana yang masih perlu ditingkatkan.

V. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan membuat perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran. Kriteria perbandingan yang digunakan dalam analisis efisiensi sebagai berikut:

- a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan atau sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasara
- b. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan atau sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran.

Tingkat Efisiensi =	$\frac{\text{Persentase Rata-Rata Capaian Sasaran}}{\text{Persentase Realisasi Anggaran}} \times 100\%$
----------------------------	---

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Sasaran	% capaian kinerja sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	1	100%	73.522.785.308,00	69.806.826.022,00	95%	105%	efisien

VI. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

NO	SASARAN	PROGRAM
13	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

NO	SASARAN	PROGRAM
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya Tahun 2024 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 12); pagu dan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya sebagai berikut:

REALISASI ANGGARAN

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Sasaran	% capaian kinerja sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya kualitas pendidikan dan prestasi pemuda	3	136,62%	409.325.25.260,00	377.488.978.784,00	92%
2		Meningkatnya layanan dan aksesibilitas kesehatan	1	100%	253.912.024.429,00	231.130.802.857,02	91%
3		Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	1	95%	15.991.024.722,00	15.583113.362,00	97%
4		Meningkatnya daya saing tenaga kerja	1	112%	9.061.947.085,00	8.609.001.131,00	95%
5	Meningkatkan Kualitas Pariwisata	Meningkatnya kualitas sektor pariwisata dan kebudayaan	1	100%	34.913.994.071,00	34.476.693.648,00	99%
6	Menciptakan pemerataan pembangunan antar wilayah Kecamatan yang berkelanjutan	Terwujudnya pemerataan infrastruktur ekonomi maupun sosial antar kecamatan	1	102%	291.154.080.921,00	282.731.935.894,68	97%
7		Terjaganya kualitas lingkungan hidup	1	97%	76.089.139.921,00	74.390.476.847,22	98%

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Sasaran	% capaian kinerja sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi anggaran
8	Meningkatkan Perekonomian Daerah	Meningkatnya perekonomian sektor strategis	1	96%	52.722.168.439,00	48.972.403.752,89	93%
9		Meningkatnya investasi daerah	1	1.370%	14.029.084.279,00	13.371.004.651,00	95%
10	Meningkatnya Kerukunan dan Ketertiban di Kalangan Masyarakat	Meningkatnya ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat	2	62,45%	57.179.457.660,00	56.248.215.549,00	98%
11	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas	4	110,06%	219.890.664.910,00	203.618.609.462,89	93%
12		Meningkatnya kualitas perencanaan daerah	1	111%	19.494.772.155,00	18.381.683.720,00	94%
13		Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	1	100%	73.522.785.308,00	69.806.826.022,00	95%

Tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja

Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024			
Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian
Pendapatan Daerah	1.464.011.748.708,00	1.417.850.526.906,33	96,85%
Belanja Daerah	1.549.940.752.475,00	1.456.074.109.672,67	93,94%

Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain pendapatan yang sah. Untuk Belanja terdiri dari Belanja Operasional, Belanja Modal dan Belanja tak terduga yang menjadi fokus perbandingan Akuntabilitas keuangan tahun 2024.

Dari tabel di atas dapat dilihat perbandingan pada poin Pendapatan daerah dimana di anggarakan sebesar 1.464.011.748.708,00 Rupiah mencapai

realisasi sebesar 1.417.850.526.906,33 Rupiah dimana persentase capaiannya mencapai 96,85 %.

Perbandingan belanja daerah pada tabel diatas secara kasat mata mengalami efesiensi dimana mencapai 93.94%. Dapat dikatakan bahwa kinerja yang baik bukan hanya terealisasi 100% anggaran yang ada. Namun Efesiensi anggaran juga bisa menjadi tolak ukur suatu keberhasilan suatu kinerja pada Pemerintah Daerah.

BEBERAPA PENGHARGAAN YANG DI RAIH KOTA PALANGKA RAYA UNTUK TAHUN 2024

1. Penghargaan FKUB Award



prokompky Pj. Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu menerima Penghargaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Award bertempat di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Rabu (28/02/2024).

FKUB Award diberikan kepada Pemerintah Kota Palangka Raya atas dukungan anggaran, peran dan komitmen yang tinggi dalam memelihara kerukunan umat beragama di Kalimantan Tengah tahun 2023 melalui FKUB Kota Palangka Raya.

Kegiatan penyerahan FKUB Award juga dirangkai dengan acara launching Buku Potret Moderasi Beragama di Tengah Pluralisme yang dalam kesempatan tersebut acara dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Kaleng, H. Edy Pratowo.

Dalam kesempatan itu, Pj. Wali Kota menyampaikan syukur atas penghargaan yang telah diberikan. "Alhamdulillah Kota Palangka Raya telah mendapatkan penghargaan tersebut, tadi disampaikan juga oleh Ketua FKUB Kalteng, bahwa Pemerintah Kota Palangka Raya peringkat ke dua di tingkat Nasional dalam kepedulian dan mendukung Forum Kerukunan Umat Beragama ini menjadi motivasi kita

2. Sertifikat Penghargaan bebas Frambusia



58 1

prokompky Pj. Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu menerima sertifikat penghargaan bebas frambusia dari Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin pada Rabu, 06 Maret 2024 bertempat di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta.

Penerimaan sertifikat bebas Frambusia ini merupakan apresiasi terhadap Pemerintah Daerah yang telah melakukan upaya surveillance frambusia berkinerja baik dan serangkaian kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular demi mensukseskan eradikasi frambusia di Indonesia.

Adapun Penerima Sertifikat Bebas Frambusia dari Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Kabupaten Katingan, Pulang Pisau, Barito Timur, Seruyan, Kapuas, Kotawaringin Timur dan Kota Palangka Raya.

Pj. Wali Kota Palangka Raya menyampaikan bahwa penghargaan bebas frambusia ini berkat kerjasama Pemerintah dan Stakeholder yang ada serta masyarakat Kota Palangka Raya.

3. Pemerintah Kota Palangka Raya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)



52 1



Disukai oleh **umimastikah** dan **lainnya**

prokompky Pemerintah Kota Palangka Raya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023, bertempat di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Kalteng. Pj. Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu menerima LHP tersebut yang diserahkan secara langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalteng, M. Ali Asyhar, Senin (27/5/2024).

Diketahui opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Tahun Anggaran 2023 ini merupakan kedelapan kalinya berturut-turut yang diterima oleh Pemerintah Kota Palangka Raya.

Dalam sambutan Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Tengah menyampaikan, penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan dilakukan secara menyeluruh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan.

4. Penghargaan Kualitas baik “B” dalam Penerapan Sistem Merit



prokompy Pemerintah Kota Palangka Raya mendapatkan penghargaan atas keberhasilannya menerapkan Sistem Merit dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Tahun 2024 dengan Kualitas Baik "B".

Penghargaan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tersebut diterima oleh Pj. Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu yang diserahkan langsung oleh Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA bertempat di Kantor KASN pada Senin (9/9/2024).

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014, Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, untuk menghasilkan ASN yang profesional dan berintegritas.

Pj. Wali Kota Palangka Raya sangat bersyukur dan mengapresiasi segenap pihak yang turut andil dalam keberhasilan Pemerintah Kota Palangka Raya mendapatkan penghargaan tersebut, mengingat penghargaan tersebut merupakan cerminan bahwa kualitas Pemerintah Kota Palangka Raya dalam mengelola kualitas Sumber Daya

5. Penganugerahan Penghargaan Perlindungan Konsumen 2024



prokompy Pemerintah Kota Palangka Raya meraih Anugerah Pasar Tertib Ukur (PTU) dari Kementerian Perdagangan RI tahun 2024 yang diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Perdagangan RI, Dyah Roro Esti Widya Putri kepada Pj. Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu dalam acara Penganugerahan Penghargaan Perlindungan Konsumen 2024 di Kota Banjarmasin, Senin (18/11/2024).

Dalam kesempatan ini Pj. Wali Kota mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas pencapaian yang telah diraih dan tidak lepas dari kerja keras dan konsistensi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya dalam memberikan pelayanan terbaik untuk melindungi hak-hak konsumen.

Anugerah PTU merupakan apresiasi dari Kementerian Perdagangan RI atas kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan kemetrolagian khususnya tera dan tera ulang terhadap alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya sehingga meningkatkan perlindungan konsumen untuk mendapatkan haknya dalam transaksi perdagangan dan industri.

6. Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024



Disukai oleh **kominfoplk** dan **lainnya**

prokompy Jumat (13/12/2024) Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah menggelar Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 bertempat di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah.

Acara yang dihadiri unsur Forkopimda Prov Kalteng, Bupati/Pj. Bupati/Pj. Wali Kota Se Kalteng, Kepolisian Resor Se Kalteng, OPD Prov Kalteng, Instansi Vertikal, Kantor Pertanahan se Kalteng dan tamu undangan lainnya ini menjadi ajang apresiasi terhadap upaya gigih Pemerintah Daerah, Kepolisian, dan Kantor Pertanahan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Palangka Raya berhasil meraih Peringkat 1 Terbaik Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten Kota, sedangkan kategori Terbaik Perangkat Daerah berhasil diraih oleh Puskesmas Menteng Kota Palangka Raya, Keberhasilan tersebut tidak lepas dari penerapan sistem pelayanan yang terintegrasi, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta inovasi-inovasi yang memudahkan akses masyarakat terhadap layanan publik.

7. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024



prokompky Pemerintah Kota Palangka Raya menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 yang digelar di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Rabu (4/12/2024) malam.

Penghargaan itu diserahkan oleh Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo Provinsi Kalteng, yang diterima langsung Pj. Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu.

Dalam kesempatan tersebut Pj. Wali Kota menyampaikan terimakasih kepada Pemprov Kalteng dan Komisi Informasi Kalteng serta seluruh jajaran Pemko Palangka Raya. "Kami terus berkomitmen untuk mempertahankan prestasi dan menjadikan momen ini untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi, memperkuat kepercayaan publik, dan membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik," ucapnya.

Pemerintah Kota Palangka Raya meraih nilai 96,27, dengan kategori Informatif yang mana penghargaan ini merupakan kali ke lima berturut-turut yang didapatkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya dalam Penganugerahan

8. Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024



34



Disukai oleh kominfoplk dan lainnya

prokompky Jumat (13/12/2024) Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah menggelar Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 bertempat di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah.

Acara yang dihadiri unsur Forkopimda Prov Kalteng, Bupati/Pj. Bupati/Pj. Wali Kota Se Kalteng, Kepolisian Resor Se Kalteng, OPD Prov Kalteng, Instansi Vertikal, Kantor Pertanahan se Kalteng dan tamu undangan lainnya ini menjadi ajang apresiasi terhadap upaya gigih Pemerintah Daerah, Kepolisian, dan Kantor Pertanahan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Palangka Raya berhasil meraih Peringkat 1 Terbaik Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten Kota, sedangkan kategori Terbaik Perangkat Daerah berhasil diraih oleh Puskesmas Menteng Kota Palangka Raya, Keberhasilan tersebut tidak lepas dari penerapan sistem pelayanan yang terintegrasi, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta inovasi-inovasi yang memudahkan akses

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dalam pencapaian visi, misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan good governance. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan program yang dijalankan dalam tahun 2024 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang ditetapkan. Upaya yang telah dilakukan tidak terlepas dari itikad baik pemerintah untuk selalu senantiasa meningkatkan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani seluruh elemen masyarakat dalam rangka bersama-sama mewujudkan cita-cita Kota Palangka Raya. Dapat dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi solusi bagi masalah yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka peningkatan dan penyempurnaan kinerja yang lebih baik diantaranya sebagai berikut:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi serta perbaikan secara berkala atas sistem dan mekanisme pengumpulan data kinerja agar dapat dilakukan upaya perbaikan kinerja yang mana masih belum optimal serta sebagai bahan pertimbangan perencanaan pembangunan di masa mendatang.
- b. Perlunya peningkatan pola komunikasi dan sinergi dari semua Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.
- c. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keekonomisan pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai tujuan, sasaran yang dikaitkan dengan upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
- d. Melakukan koordinasi dan konsolidasi organisasi secara internal dalam rangka meningkatkan komitmen jajaran aparatur Pemerintah Kota Palangka Raya terhadap penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

- e. Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia yang ada sebagai motor penggerak dan pelaku pembangunan sekaligus selaku pelayan masyarakat.
- f. Membuat kebijakan pemberian motivasi kerja berupa reward and punishment terhadap pelaksana di tingkat Perangkat Daerah yaitu memberikan reward kepada Perangkat Daerah yang kinerjanya mencapai/melebihi target serta memberikan punishment kepada Perangkat Daerah yang capaian kinerjanya tidak/belum/masih di bawah target.

Pemerintah kota Palangka Raya terus berupaya meningkatkan penguatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Bagian Organisasi akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Bappeda dan Inspektorat serta Perangkat Daerah agar pengelolaan LAKIP dan SAKIP di Kota Palangka Raya pada tahun ini semakin optimal. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta birokrasi yang berorientasi pada pelayanan secara cepat, tepat, murah, adil dan merata.

Segecap jajaran Pemerintah Kota Palangka Raya mengharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 ini dapat memenuhi kewajiban pelaporan akuntabilitas sebagaimana yang telah ditetapkan serta sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan yang berguna dalam upaya perbaikan dan peningkatan kinerja selanjutnya. Untuk keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja telah dilakukan analisis dan evaluasi, sehingga dapat diketahui langkah-langkah strategis dan upaya perbaikan yang dilaksanakan dalam mencapai target kinerja di tahun mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2024 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Pemerintah Kota Palangka Raya untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.